



**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

LAPORAN KINERJA

20 22

**DIREKTORAT
PENGEMBANGAN
SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**

KATA PENGANTAR



AGUS SULAEMAN
Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Pembiayaan

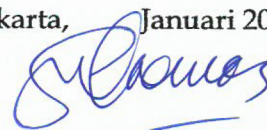
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja dan implementasi terhadap kepatuhan pelaporan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang baik (good governance), juga tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018

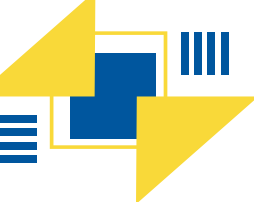
tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan kinerja ini merupakan gambaran sejumlah ketercapaian kinerja berdasarkan target dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan serta mendukung keberhasilan Sasaran Program dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020-2024.

Dalam mencapai nilai kinerja sebesar 105,25% di 2022, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tentu dihadapkan pada beberapa tantangan dan permasalahan, namun dengan adanya komitmen serta sinergi dalam membangun kerjasama tim, Direktorat PSSPP mampu membangun budaya kerja yang solid. Kami berharap melalui Laporan kinerja ini dapat menyajikan informasi yang komprehensif mengenai capaian kinerja dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah menjadi kesepakatan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2022.

Akhir kata, tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2022. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan terkait serta dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun kebijakan pada tahun berikutnya demi perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Jakarta, Januari 2023


Agus Sulaeman



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menjalankan satu sasaran program dan satu sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2022, yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dan Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menjalankan indikator kinerja kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan target sebesar 100%.

Untuk mendukung capaian target kinerja, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengemban tugas untuk menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. Pelaksanaan tugas tersebut kemudian dijabarkan dalam Renstra TA 2020-2024, melalui delapan output kegiatan, antara lain: (1) Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan, (2) Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (3) Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (4) Norma Standar Prosedur Dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (5) Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan, (6) Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (7) Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan (8) Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

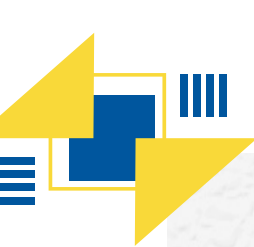
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diukur berdasarkan penjumlahan dari tiga indikator kontributor, yakni: (1) Tingkat Implementasi Kegiatan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (40%), Tingkat Implementasi Kegiatan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur



Pekerjaan Umum dan Perumahan (30%), dan Tingkat Implementasi Kegiatan Penyelenggaraan SAKIP (30%). Untuk mewujudkan realisasi sasaran kegiatan di TA 2022, disusun strategi pelaksanaan kegiatan dengan melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai PK dan penyelerasan terhadap alokasi anggaran berdasarkan DIPA, serta memaksimalkan penggunaan media informasi secara daring untuk mendukung kegiatan potensial sebagai langkah efisiensi. Oleh sebab itu, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan senantiasa melakukan peningkatan dan pengembangan program dan kegiatan, diantaranya terlihat pada: (1) kualitas pengelolaan data dan informasi melalui website simpul KPBU, pengembangan aplikasi new Sistem Informasi Registrasi Pengembang (new SIRENG) dan beberapa aplikasi sejenis lainnya, (2) inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja (ex-post) melalui penerapan analisis input output dalam rangka menilai dampak multiplier pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dan (3) penyusunan rencana umum proyek KPBU 2022-2024.

Berdasarkan data i-emonitoring PUPR, realisasi penyerapan TA 2022 adalah sebesar Rp28.977.085.000 dari total pagu sejumlah Rp30.069.995.000 atau terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.092.910.000. Penggunaan sumber daya anggaran tahun ini dapat dikatakan efisien, karena dengan input anggaran yang lebih kecil dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target. Langkah ini ditempuh dalam bentuk penghematan atau pengurangan besaran dari Belanja Birokrasi, meliputi Belanja Bahan, Belanja Honorarium termasuk Honorarium Output Kegiatan, Honorarium Tim Kegiatan dan Honorarium Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Paket Meeting. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan juga mendukung kebijakan negara untuk realokasi anggaran automatic adjustment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp537.128.000.

Selama tiga tahun terakhir, nilai kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengalami tren peningkatan. Pada 2020, nilai kinerja sebesar 98,13%. Sementara itu, pada 2021, nilai kinerja sebesar 100,80% dan pada 2022 sebesar 105,25%, atau meningkat 4,45% dibanding tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan senantiasa melakukan perbaikan kinerja melalui pelatihan dan pengembangan pegawai, penguatan budaya kerja, penerapan dialog dan bimbingan kinerja, serta tetap mengedepankan aspek pengawasan dan pengendalian manajemen risiko untuk pencegahan fraud di internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Strategi penguatan manajemen risiko melalui kepatuhan internal juga diaplikasikan melalui analisis profil risiko proyek infrastruktur KPBU bidang PUPR.



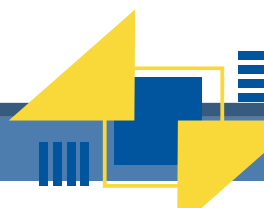
Meskipun pada 2023 diprediksi adanya ancaman resesi ekonomi global dan dapat berdampak terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menurunkan kinerja pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan optimis mampu mencapai kinerja sesuai target PK (100%). Adanya rencana lanjutan evaluasi kelembagaan organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada 2023 diharapkan akan menguatkan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. Pada 2023, terdapat upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

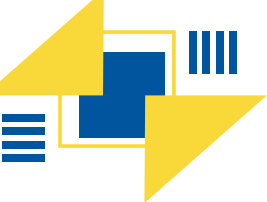
1. Fokus pada evaluasi lanjutan pelaksanaan paket-paket kegiatan potensial yang berlangsung di tahun sebelumnya.
2. Pemetaan paket kegiatan baru yang menunjang tugas dan fungsi.
3. Akselerasi kerjasama dan kemitraan terutama dalam hal dukungan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara.
4. Meningkatkan koordinasi antar K/L sebagai upaya mendorong pengembangan sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan yang berketahanan dan berkelanjutan.
5. Mengembangkan instrumen kebijakan pembiayaan infrastruktur alternatif, melalui kegiatan penelitian dan/atau kajian instrumen kebijakan pembiayaan infrastruktur bersama di bidang infrastruktur sumber daya air, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
6. Asesmen perencanaan secara berkala sesuai dengan target pada Renstra dan DIPA untuk memproyeksikan tingkat kualitas dan kebermanfaatan dari seluruh aktivitas yang dilakukan.
7. Meningkatkan pemutakhiran pengelolaan data dan informasi pembiayaan infrastruktur bidang PUPR.
8. Meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap pelaporan kinerja.
9. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan proses bisnis.
10. Penguatan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan mewujudkan konsep money follow program dan valuer for money.



DAFTAR ISI

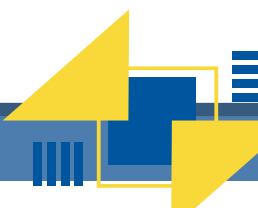
KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	I
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR GRAFIK	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4. Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Perjanjian Kinerja	12
2.3. Metode Pengukuran	14
2.4. Target Tahun 2022 Menurut Renstra	16
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	19
3.1. Sumber Daya Manusia	19
3.2. Sarana Dan Prasarana	28
3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	32
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	33
4.1. Capaian Kinerja	33
4.2. Perbandingan Kinerja	41
4.3. Realisasi Anggaran	52
4.4. Analisis Efektivitas dan Efisiensi	57
4.5. Analisis Dampak dan Manfaat	59
4.6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	60
4.7. Kinerja Lain-Lain	65
4.8. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	68
BAB V PENUTUP	76
5.1. Permasalahan	78
5.2. Rekomendasi	78
LAMPIRAN	80
Data Pegawai	80
Daftar Kegiatan Pengembangan SDM	86
Sasaran Kegiatan	90
Target Kinerja Dan Pendanaan	94
Perjanjian Kinerja	98
Rencana Kerja	99
Pohon Kinerja	100
Metode Pengukuran	104
Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja	105
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	106
Matriks Pemantauan Inovasi Pengendalian Pada Tingkat UPR T-2	107
Matriks Pemantauan Level Risiko Pada Tingkat UPR T-2	108
Hasil Penilaian Atas Penerapan Manajemen Risiko	109

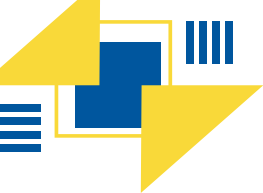




DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.....	13
Tabel 2. 2 Metode Pengukuran Kinerja	15
Tabel 2. 3 Target Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sesuai Renstra 2020-2024.....	16
Tabel 3. 1 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Status	19
Tabel 3. 2 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Gender.....	20
Tabel 3. 3 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Golongan.....	20
Tabel 3. 4 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Usia	21
Tabel 3. 5 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Pendidikan.....	21
Tabel 3. 6 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Jabatan.....	22
Tabel 3. 7 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional	23
Tabel 3. 10 Daftar BMN Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2022.....	30
Tabel 3. 11 Daftar Kebutuhan BMN Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2023	30
Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2022	34
Tabel 4. 2 Cascading Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2022	37
Tabel 4. 3 Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.....	38
Tabel 4. 4 Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	40
Tabel 4. 5 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2022.....	42
Tabel 4. 6 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2022 dengan Target Jangka Menengah	46
Tabel 4. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja di Level Nasional.....	52
Tabel 4. 8 Nilai Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021	68



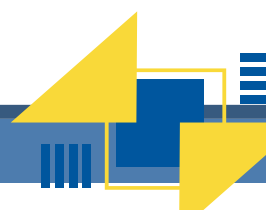


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	5
Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2022	13
Gambar 3. 1 Persentase SDM Tahun 2021	19
Gambar 3. 7 Persentase SDM Berdasarkan Gender	20
Gambar 3. 3 Persentase SDM Berdasarkan Golongan dan Gender	20
Gambar 3. 4 Persentase SDM Berdasarkan Usia.....	21
Gambar 3. 5 Persentase SDM Berdasarkan Pendidikan	22
Gambar 3. 6 Persentase SDM Berdasarkan Jabatan.....	22
Gambar 3. 7 Persentase SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	23
Gambar 3. 8 Ruang Kerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	31
Gambar 4. 1 Proses Pemrograman dan Penganggaran.....	73

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022	55
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi dan kementerian negara/lembaga (K/L) bertanggung jawab menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Selain itu, dasar penyelenggaraan AKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Dalam mendukung pencapaian target kinerja 2022, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengacu pada Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020–2024.

Pedoman Penilaian SAKIP di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan pada 2022 mempertimbangkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan pelaporan, mengukur tingkat implementasi

SAKIP, perbaikan manajemen kinerja serta memonitor tindak lanjut atas hasil rekomendasi periode sebelumnya.

Laporan kinerja tahun 2022 yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pencapaian tugas dan fungsi sesuai perjanjian kinerja kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Responsibilitas terhadap penyusunan laporan kinerja dilakukan dalam upaya peningkatan dan evaluasi atas ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Lebih lanjut, pada laporan kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (*exclency*) dan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (*equity*).

1.2. Tugas dan Fungsi

Perpres Pasal 25 Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menetapkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibantu oleh enam unit kerja Eselon II, diantaranya adalah Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

1.2.1. Tugas

Sesuai amanat Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan memiliki tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

1.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- b. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- c. Pelaksana kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- d. Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- h. Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

1.3. Struktur Organisasi

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi serta Renstra 2020-2024, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan terdiri dari tiga unit sub direktorat, yaitu:

- a. Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur;
- b. Sub Direktorat Kepatuhan Intern; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

1.3.1. Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur

Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur terdiri atas kelompok jabatan fungsional (JF), antara lain:

1. JF Analis Kebijakan;
2. JF Analis Anggaran;
3. JF Perencana;
4. JF Statistisi;
5. JF Pranata Komputer; dan
6. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

1.3.2. Sub Direktorat Kepatuhan Intern

Sub Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, dan pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan, dan pelaksanaan konsolidasi atas penerapan kepatuhan intern dan manajemen

risiko di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta penyusunan laporan rutin, laporan pimpinan, laporan kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

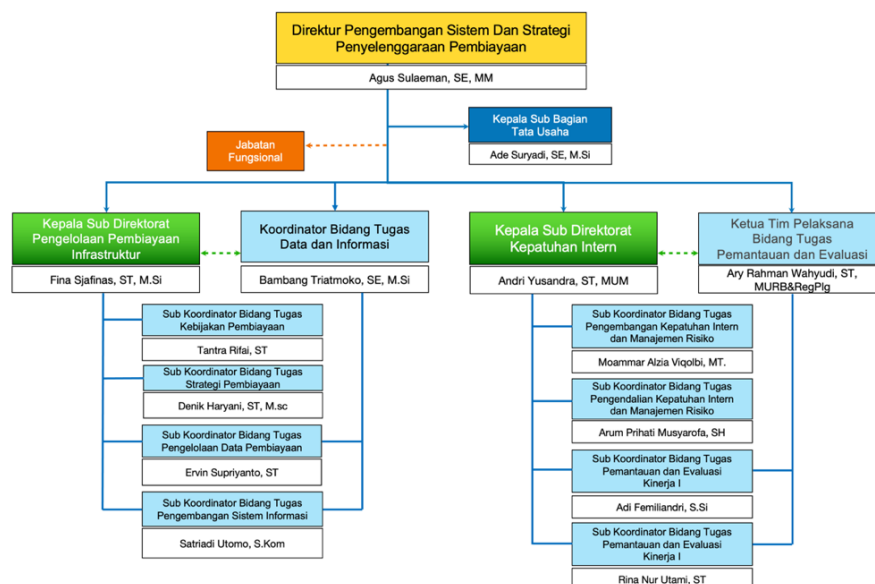
Sub Direktorat Kepatuhan Intern terdiri atas kelompok JF, antara lain:

1. JF Analisis Kebijakan;
2. JF Pranata Komputer; dan
3. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;

1.3.3. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persurutan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Sub Bagian Tata Usaha hanya terdiri atas JF Arsiparis.



Sumber: Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020- 2024

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

1.4. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan selama 2022 adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya pedoman pengelolaan manajemen risiko proyek infrastruktur KPBU PUPR.
2. Belum optimalnya penggunaan *Dashboard* Simpul KPBU dalam rangka pemantauan dan evaluasi proyek KPBU bidang PUPR.
3. Pengembangan *Dashboard* Simpul KPBU dengan menyajikan visualisasi data hasil analisis *Input-Output* (I-O) untuk mengukur dampak ekonomi dari pembangunan proyek infrastruktur membutuhkan waktu dan kajian yang cukup.
4. Rendahnya kedalaman analisis terhadap data dan informasi terkait pasar perumahan dan hasil kajian pembiayaan perumahan.
5. Belum adanya Surat Edaran tentang penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
6. Belum maksimalnya pengintegrasian dan pembaharuan *big data* pada HREIS.
7. Belum ditetapkannya regulasi tentang Rencana Umum proyek KPBU bidang PUPR periode 2022-2024.



Konsinyasi Penyusunan Rencana Umum Kpbu Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): *Eligibility Rules* Proyek Kpbu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024 dan Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020, sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra harus dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan pada masing-masing unit kerja dan unit pelaksana teknis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Perencanaan strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan disusun berlandaskan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP. Penyelenggaraan SAKIP berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dan sebagai alat pengendalian manajemen. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan memuat tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk mencapai target yang diperjanjikan tahun 2020-2024.

Penetapan *output* Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan telah selaras dengan Renstra Kementerian PUPR pada sasaran strategis (SS-5), “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) “Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif” dinilai berdasarkan **Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**.

Selain itu, kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan juga berkontribusi terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS-2), “Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif sebesar 100 persen”. Kontribusi capaian yang dimaksud berasal dari

kegiatan: (1) survei tingkat kualitas pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dibandingkan dengan target (30%) dan (2) survei tingkat penerapan hasil pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dibandingkan dengan target (30%).

1. Tujuan

Tujuan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, termasuk kebijakan bantuan pembiayaan perumahan.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan (termasuk program jangka menengah, tahunan, dan identifikasi proyek KPBU) dan evaluasi pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berbasis *database*.
- c. Meningkatkan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
- e. Meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2020-2024 disusun untuk mendukung sasaran program dukungan manajemen yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Kemudian, sasaran kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

3. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PUPR.
- b. Peningkatan Koordinasi antara Simpul KPBU, unit organisasi di Kementerian PUPR dengan kantor bersama KPBU.
- c. Penyusunan rencana umum proyek KPBU infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020-2024.
- d. Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui *bundling* infrastruktur.
- e. Pengembangan skema pembiayaan KPBU.
- f. Pembentukan badan layanan umum (BLU) di Kementerian PUPR yang berfungsi sebagai pembiayaan sementara (*bridging finance*) KPBU bidang PUPR dan instrumen pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- g. Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*) untuk proyek *unsolicited*;
- h. Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek KPBU *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa;
- i. Pemusatan kembali anggaran kegiatan penyiapan proyek KPBU Bidang PU dan Perumahan;
- j. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan dukungan pembiayaan infrastruktur;
- k. Memperluas kerjasama dengan lembaga jasa keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR rumah umum.



Workshop Pengembangan Manajemen Risiko Proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan melalui *lesson learned* Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung

2.2. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja (PK) Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah bentuk komitmen kinerja yang disepakati antara Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pada dokumen PK memuat target atau capaian hasil (*outcome*) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan strategis selama periode tertentu.

Sesuai Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR, PK mampu menunjukkan keberhasilan/kegagalan atas indikator kinerja utama (IKU). Selain itu, PK berguna sebagai dasar penilaian penghargaan dan/atau sanksi, penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP), pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kualitas perencanaan, dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap upaya perbaikan dan strategi peningkatan kinerja di periode selanjutnya.

Pada tahun 2022, PK Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengalami empat kali perubahan sehingga terdapat lima dokumen PK. PK awal diterbitkan pada Januari 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp11.330.000.000. Pada dokumen PK awal, tercantum satu sasaran kegiatan dan satu indikator kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sedangkan, indikator kinerja kegiatan yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan, dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Revisi pertama PK diterbitkan pada bulan Maret 2022. Pada revisi PK ini terjadi penambahan pagu anggaran semula Rp11.330.000.000, menjadi Rp20.827.775.000. Alasan adanya revisi karena perubahan anggaran yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) dan pergeseran anggaran antar klasifikasi rincian *output* (KRO).

Revisi kedua PK diterbitkan pada bulan Oktober 2022. Pada revisi PK ini terjadi penambahan pagu anggaran semula Rp20.827.775.000, menjadi Rp31.800.827.000. Alasan adanya revisi karena perubahan anggaran yang bersumber dari PHLN, pergeseran anggaran antar KRO, pemanfaatan sisa anggaran kontraktual, pemenuhan belanja operasional, pergeseran dari belanja pegawai operasional dan pembukaan blokir.

Revisi ketiga PK diterbitkan pada bulan November 2022. Pada revisi PK ini terjadi pengurangan pagu anggaran semula Rp31.800.827.000, menjadi Rp31.663.700.000. Alasan

adanya revisi karena penyesuaian akibat pergeseran *automatic adjusment* dan pergeseran anggaran antar KRO.

Revisi keempat PK diterbitkan pada bulan Desember 2022. Pada revisi PK ini kembali terjadi pengurangan pagu anggaran semula Rp31.663.827.000, menjadi Rp31.263.700.000. Alasan adanya revisi karena penyesuaian akibat pergeseran *automatic adjusment* dan pergeseran anggaran antar KRO. Rincian perubahan PK selama 2022 terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2022

Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
	Meningkatnya pelaksanaan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Tingkat pencapaian pelaksanaan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	%	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2022

2.3. Metode Pengukuran

Sasaran dan indikator kinerja pada Renstra dan rencana kerja (Renja) dijabarkan dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja tahun 2022, baik pada level Direktur Jenderal maupun level Pejabat Eselon II. Sebagai alat ukur atas pencapaian kinerja, maka perlu dipastikan penjabaran (*cascading*) kinerja sesuai dengan penetapan indikator kegiatan pada PK dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Pengukuran kinerja bertujuan memastikan tingkat capaian kinerja berdasarkan target yang dicantumkan pada dokumen Renstra sehingga dapat dianalisis relevansi dan keberlanjutan dari rangkaian kegiatan yang diprioritaskan selama periode 2020-2024.

Metode pengukuran yang ideal menjadi dasar untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan dan tercapainya *output* dari kegiatan tersebut. Penetapan indikator dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah diukur dan mudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Berikut merupakan IKU *output* pengembangan sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan.

1. Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan;
2. Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
5. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan;
6. Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
7. Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; serta
8. Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Penetapan tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 sebesar 100% didukung oleh delapan output kegiatan. Pembobotan capaian kinerja tersebut berdasarkan tiga indikator, yaitu indikator pertama (40%) diperoleh dari *ouput* kegiatan Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur, sedangkan

indikator kedua (30%) dan indikator ketiga (30%) dihasilkan dari *ouput* kegiatan Subdirektorat Kepatuhan Intern. Metode pengukuran kinerja terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Metode Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan sbb:
	1. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%)	Indikator I (40%) - Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%) - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) - Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%) - Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) - Jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%)
	2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)	
	3. Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)	Indikator 2 (30%) - Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) - Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) Indikator 3 (30%) Penilaian dari Kementerian PAN dan RB

Sumber: Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA 2020-2024

2.4. Target Tahun 2022 Menurut Renstra

Sesuai Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melaksanakan kegiatan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan. Output kegiatan dan target kinerja kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 menurut Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 3 Target Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sesuai Renstra 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis (<i>Impact</i>)/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan/ <i>Output</i> /Indikator	Satuan	Target
KEGIATAN 2: Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :			
1.	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100
KOORDINATOR: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			
	OUTPUT KEGIATAN :		
1.	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0
2.	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	6
3.	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	6
4.	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK	1
5.	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1
6.	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	3
7.	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	4
8.	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	3

Sumber: Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA 2020-2024





FGD Pembahasan Kerangka Pelaksanaan KPB (Public Private Partnership/PPP Framework) di Kementerian PUPR



BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

3.1. Sumber Daya Manusia

3.1.1. Gambaran Umum Pegawai

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting dan utama dalam proses pencapaian kinerja organisasi. Peranan strategis SDM menentukan arah tata pengelolaan instansi pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini dijelaskan dalam Permen PUPR Nomor 896/KPTS/M/2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2020-2024. Adapun pelaksanaan internalisasi *core value* Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAkhlak di lingkungan Kementerian PUPR, bertujuan sebagai bentuk penguatan peran SDM yang unggul dan mampu menungjang terlaksananya penguatan tugas dan fungsi organisasi.

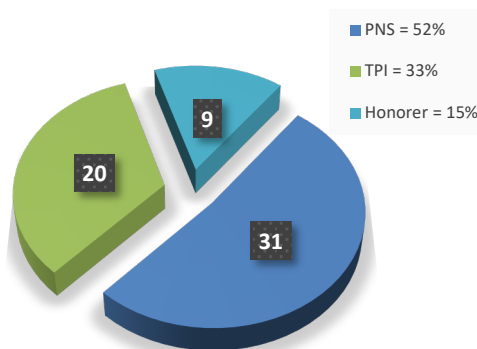
Penataan komposisi SDM di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan berjumlah 60 orang pegawai, terdiri dari 31 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 9 orang pegawai non PNS dan 20 orang Tenaga Pendukung Individu (TPI). Rekapitulasi SDM Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

A. SDM Berdasarkan Status

Berdasarkan status pegawai, jumlah PNS dan non PNS di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 sebanyak 60 orang pegawai. Komposisi pegawai PNS paling banyak merupakan Staf/Pelaksana berjumlah 17 orang pegawai, sedangkan pegawai non PNS didominasi oleh TPI berjumlah 20 orang pegawai.

Tabel 3. 1 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Status

No	Status	Jumlah
1	PNS	31
	Pimpinan Tinggi Pratama	1
	Pejabat Administrator/KPT	2
	Pejabat Pengawas/SKPT	11
	Staf/Pelaksana	17
2	Non PNS	29
	Pegawai Honorer	9
	TPI	20
Total		60



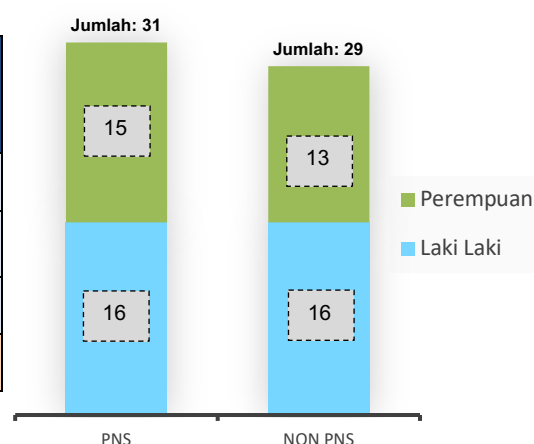
Gambar 3. 1 Persentase SDM Tahun 2021

B. SDM Berdasarkan Gender

Berdasarkan gender, persentase laki-laki sebesar 53% dan perempuan sebesar 47%. Angka ini menunjukkan bahwa selisih (*gap*) antara pegawai laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh signifikan. Adanya kesetaraan gender dalam pelaksanaan tugas di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan diharapkan dapat memotivasi semua pegawai mempunyai kapasitas dan kompetensi sesuai keahliannya tanpa melihat latar belakang jenis kelamin.

Tabel 3. 2 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Gender

No	Status Pegawai	Gender		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	16	15	31
2	Pegawai Honorer	5	4	20
3	TPI	11	9	9
Total		32	28	60



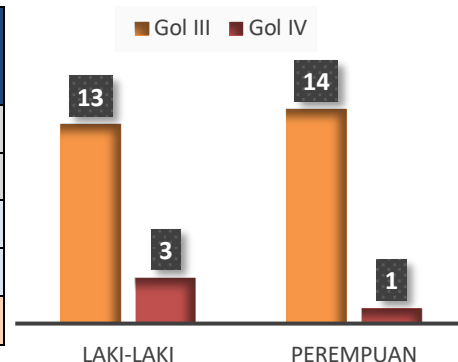
Gambar 3. 2 Persentase SDM Berdasarkan Gender

C. SDM Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, persentase golongan III sebesar 87% dan golongan IV sebesar 13%. Komposisi golongan didominasi oleh perempuan sebanyak 16 orang pegawai, sedangkan laki-laki sebanyak 15 orang pegawai. Secara keseluruhan, total PNS golongan III dan IV di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2022 adalah 31 orang pegawai.

Tabel 3. 3 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Gender		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	0	0	0
3	Golongan III	13	14	27
4	Golongan IV	3	1	4
Total		16	15	31



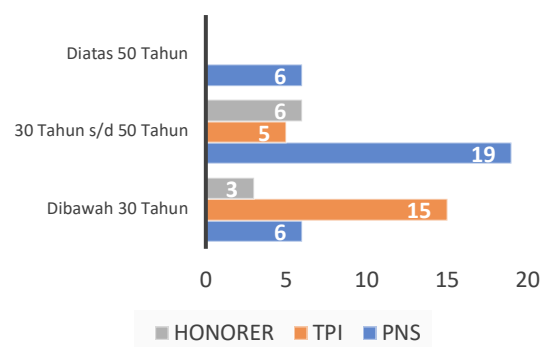
Gambar 3. 3 Persentase SDM Berdasarkan Golongan dan Gender

D. SDM Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia, kategori pegawai berumur 30 tahun s/d 50 tahun memiliki jumlah paling banyak (50%) dibanding pegawai berumur dibawah 30 tahun (40%) dan diatas 50 tahun (10%). Berdasarkan klasifikasi usia produktif, generasi milenial mendominasi pegawai di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022.

Tabel 3. 4 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Usia

No	Usia	PNS	Non PNS		Jumlah
			TPI	Honoror	
1	Dibawah 30 Tahun	6	15	3	24
2	30 Tahun s/d 50 Tahun	19	5	6	30
3	Diatas 50 Tahun	6	0	0	6
Total		31	20	9	60



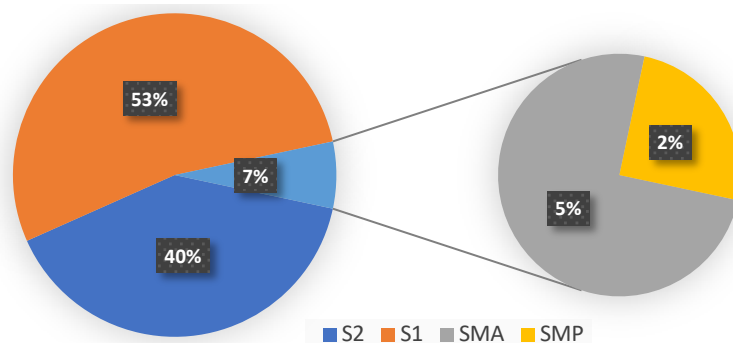
Gambar 3. 4 Persentase SDM Berdasarkan Usia

E. SDM Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, mayoritas SDM di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 adalah lulusan S1 sebanyak 32 orang pegawai, sedangkan pendidikan lulusan S2 rata-rata didominasi oleh pegawai PNS baru dan TPI. Pegawai yang berstatus pendidikan SMA dan SMP adalah untuk jabatan Pengadministrasian Umum, Pramubakti dan Pengemudi.

Tabel 3. 5 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Non PNS		Jumlah
			TPI	Honoror	
1	S3	0	0	0	0
2	S2	20	4	0	24
3	S1	11	16	5	32
4	D3	0	0	0	0
5	SMA	0	0	3	3
6	SMP	0	0	1	1
Total		31	20	9	60



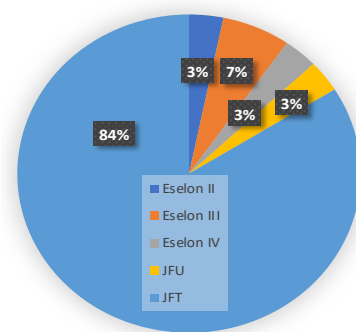
Gambar 3.5 Persentase SDM Berdasarkan Pendidikan

F. SDM Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan, komposisi jabatan fungsional tertentu (JFT) hampir mendominasi di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 yakni sebesar 84%. JFT terdiri dari JF Analis Kebijakan, JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, JF Pranata Komputer, JF Analis Anggaran dan JF Statistisi. Selain itu, merupakan pegawai yang menduduki jabatan Eselon II (3%), Eselon III (5%), Eselon IV (3%) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebesar 3%.

Tabel 3.6 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	PNS	Gender		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	1	0	1
2	Eselon III	2	1	1	2
3	Eselon IV	1	1	0	1
4	JFU	1	0	1	1
5	JFT	26	13	13	26
Total		31	16	15	31



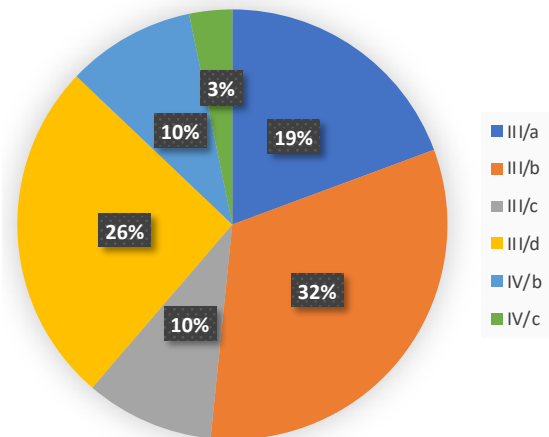
Gambar 3.6 Persentase SDM Berdasarkan Jabatan

G. SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

Berdasarkan Jabatan Fungsional, Golongan III/b dan III/c adalah mayoritas di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022. Pembina Utama Muda/IV/c merupakan golongan tertinggi dan diduduki oleh Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. Terdapat 3 orang pegawai yang berstatus Pembina Tingkat I/IV-b adalah Kasubdit Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur, Kasubdit Kepatuhan Intern dan Koordinator Perencanaan, Pengelolaan Data dan Informasi.

Tabel 3. 7 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

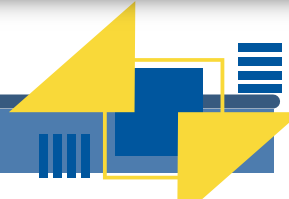
No	Golongan	Jumlah
1	III/a	6
2	III/b	10
3	III/c	3
4	III/d	8
5	IV/a	0
6	IV/b	3
7	IV/c	1
8	IV/d	0
9	IV/e	0
Total		31



Gambar 3. 7 Persentase SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional



Workshop Pengelolaan Risiko atas Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



3.1.2. Program Pengembangan Pegawai

Pembangunan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya ditentukan oleh peranan manajemen SDM. Berbagai keputusan strategis sampai dengan implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh SDM sebagai penyelenggara negara. Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021, pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, salah satu bentuk optimalisasi SDM internal dilakukan melalui pengembangan kompetensi. Penyelenggaraan program pengembangan pegawai yang telah dilaksanakan dan diikuti oleh pegawai Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan selama 2022 tidak hanya dikhususkan bagi PNS, namun memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai non PNS (Honorar dan TPI) untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi. Dengan penyelenggaraan program tersebut, dapat menjadi indikator keberhasilan efektivitas dan efisiensi SDM dalam suatu organisasi. Tingkat partisipasi dan antusiasme pegawai terhadap keikutsertaan pendidikan dan/atau pelatihan merupakan komitmen mewujudkan visi PUPR 2030 dan sebagai bentuk internalisasi budaya *core value* BerAkhlak serta penguatan nilai iProVe Kementerian PUPR.

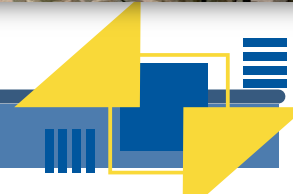
Dasar pelaksanaan program pengembangan pegawai di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan diantaranya terdapat dalam SE Menteri PUPR Nomor 20/SE/M/2019 tentang Pengelolaan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di Kementerian PUPR, Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Berikut merupakan rekapitulasi daftar program pengembangan pegawai di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan selama 2022.



Pertemuan One-on-One antara Delegasi Perusahaan Turki dengan Badan Usaha, Lembaga Pembiayaan, dan Instansi Terkait Lainnya



Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Umum KPBK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Isu Strategis dan Tren Pembiayaan Infrastruktur Nasional



3.1.3. Kebutuhan Pengembangan Pegawai

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, analisis beban kerja merupakan teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Melalui pelaksanaan analisis beban kerja dapat mengukur beban kerja jabatan yang sesuai dengan jumlah, komposisi dan kualifikasi ASN di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

Hasil analisis beban kerja menjadi tolak ukur untuk meningkatkan produktivitas kerja serta mengintegrasikan kebijakan strategis kedepan melalui pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian. Upaya tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan analisis beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara teknis, SDM merupakan penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas dan profesional di bidangnya. SDM yang dimiliki harus mempunyai motivasi tinggi, kreatif, dan mampu mengembangkan inovasi agar pencapaian kinerja akan semakin baik. Oleh karena itu, sebagai upaya dan komitmen peningkatan kualitas SDM, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melakukan analisis daftar kebutuhan pelatihan pegawai sebagai berikut.

1. Perencanaan Program dan Anggaran

- a. Perencanaan Anggaran;
- b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); dan
- c. Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Anggaran.

2. Pembiayaan Perumahan

- a. Ekosistem Pembiayaan Perumahan;
- b. *Webinar Subsidized Housing Location Suitability Tool and Program*;
- c. Amortisasi dan Kredit Pemilikan Rumah (finansial) Program;
- d. Pasar Pembiayaan Sekunder; dan
- e. Manajemen penganggaran (*capex*, *opex* dan *value for money*).

3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

- a. *Financial Modelling*;
- b. Penyusunan Studi Pendahuluan (SP), *Outline Business Case (OBC)*, dan *Final Business Case (FBC)*;
- c. *Legal drafting* Perjanjian Proyek KPBU;
- d. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU;
- e. *Certified Public-Private Partnerships Professional (CP³P)* semua level;
- f. *Training* pengelolaan *database* Proyek KPBU pada *dashboard* Simpul KPBU; dan
- g. *Public and Private Infrastructure Investment Management Center (PIMAC) Sharing Session*.
- h. Manajemen Risiko proyek KPBU;

4. Data dan Informasi

- a. Pelatihan *Junior Cyber Security*;
- b. Pelatihan Statistik dan Riset Pasar;
- c. *Training* Statistik dan Sistem Pelaporan Informasi; dan
- d. Diklat Pengolahan Data Statistik dengan Menggunakan Aplikasi.

5. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

- a. Bimbingan Teknis Evaluator SAKIP;
- b. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II; dan
- c. Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan.

3.2. Sarana Dan Prasarana

Sistem penyelenggaraan pemerintah secara menyeluruh telah mengalami perubahan baik di pusat maupun di daerah dengan berbasis kinerja dan teknologi. Keselarasan antara tingkat capaian kinerja dan pelayanan prima dihasilkan dari peranan pegawai. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu proses manajemen sarana dan prasarana untuk menjamin kecukupan akan kebutuhan unit kerja dalam mendukung berbagai pelaksanaan kegiatan dan kebermanfaatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permen Dagri) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja pasal 3 menjelaskan bahwa penataan sarana dan prasarana kerja menunjang terhadap kelancaran proses pekerjaan, kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan, dan memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Menyikapi hal tersebut diatas, saat ini Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menempati gedung **A1 lantai 2 wing 4**. Terdapat empat ruang kerja utama (ruang kerja Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, ruang kerja Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur, ruang kerja Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Intern dan satu ruang rapat internal) dan ruang kerja pegawai berupa ruang kerja terbuka (*open space*).

Secara keseluruhan, kualitas barang milik negara (BMN) di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan ber kondisi baik, namun terdapat beberapa fasilitas tersebut diantaranya dalam kondisi rusak dan jumlahnya belum optimal untuk mencukupi kebutuhan eksisting. Berikut merupakan rekapitulasi data sarana dan prasarana Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2022.



Tabel 3. 8 Daftar BMN Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2022

No	Kode	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	3050104001	Lemari Besi/Metal	11	Buah	Baik
2.	3050104004	Rak Kayu	3	Buah	Baik
3.	3050104005	Filling Cabinet Besi	3	Buah	Baik
4.	3050105015	Alat Penghancur Kertas	5	Buah	Baik
5.	3050105038	Laser Pointer	1	Buah	Rusak Berat
6.	3050105048	LCD Projector/Infocus	2	Buah	Baik
7.	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah	Baik
8.	3050201002	Meja Kerja Kayu	44	Buah	Baik
9.	3050201008	Meja Rapat	2	Buah	Baik
10.	3050201020	Kursi Fiber Glass/Plastik	87	Buah	Baik
11.	3050201026	Nakas	4	Buah	Baik
12.	3050203005	Air Cleaner	2	Buah	Baik
13.	3050204002	AC Central	5	Buah	Baik
14.	3050204004	AC Split	7	Buah	Baik
15.	3050201007	Exhaust Fan	1	Buah	Baik
16.	3050206002	Televisi	3	Buah	Baik
17.	3100102001	PC Unit	37	Buah	Baik
18.	3100102003	Notebook	5	Buah	4 Baik, 1 Rusak Ringan
19.	3100102009	Tablet PC	1	Buah	Baik
20.	3100203003	Printer	45	Buah	Baik
21.	3100203004	Scanner	3	Buah	Baik
22.	3100204026	Access Point	1	Buahs	Baik
23.	-	Kitchen Set	1	Buah	Baik
24.	-	Switch Hub	1	Buah	Baik

Tabel 3. 9 Daftar Kebutuhan BMN Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2023

No	Kode	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Alasan Penambahan Kebutuhan
1.	3100102001	PC Unit	10	Buah	Pemenuhan untuk 10 Orang PNS Angkatan 2020
2.	3100203003	Printer	10	Buah	Pemenuhan untuk 10 Orang PNS Angkatan 2020
3.	3100102003	Notebook	3	Buah	Operasional kantor (Subdit)
4.	3050105038	Laser Pointer	2	Buah	Rusak Berat



*Gambar 3. 8 Ruang Kerja
Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan*

3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 pada pagu alokasi anggaran ditetapkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: DIPA- 033.16.1.631003/2022..

Alokasi awal pagu anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebesar Rp11.330.000.000, terdiri dari kegiatan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (Rp11.330.000.000) dan layanan perkantoran (Rp1.000.000.000). Selama 2022, pagu anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengalami revisi sebanyak empat kali. Berikut merupakan rincian terhadap perubahan yang dimaksud.

Revisi DIPA pertama terbit pada tanggal 1 Maret 2022. Revisi ini terjadi karena adanya penambahan alokasi anggaran, semula Rp11.330.000.000 menjadi Rp20.827.755.000. Perubahan pagu anggaran bersumber dari PHLN dan pergeseran anggaran antar KRO.

Revisi DIPA kedua terbit pada tanggal 5 September 2022. Revisi ini terjadi karena adanya penambahan alokasi anggaran, semula Rp20.827.755.000 menjadi Rp31.800.827.000. Perubahan pagu anggaran bersumber dari PHLN, pergeseran anggaran antar KRO, pemanfaatan sisa anggaran kontraktual, pemenuhan belanja operasional, pergeseran dari belanja pegawai operasional dan pembukaan blokir.

Revisi DIPA ketiga terbit pada tanggal 31 Oktober 2022. Revisi ini terjadi karena adanya *refocusing* anggaran (pemusatan kembali anggaran), semula Rp31.800.827.000 menjadi Rp31.663.700.000. Perubahan pagu anggaran utamanya dialokasikan untuk penyesuaian akibat pergeseran *automatic adjustment* dan pergeseran anggaran antar KRO.

Revisi DIPA keempat terbit pada tanggal 5 September 2022. Revisi ini terjadi karena adanya *refocusing* anggaran (pemusatan kembali anggaran), semula Rp31.663.700.000 menjadi Rp31.263.700.000. Perubahan pagu anggaran utamanya dialokasikan untuk penyesuaian akibat pergeseran *automatic adjustment* dan pergeseran anggaran antar KRO.

Dengan adanya revisi DIPA sebanyak empat kali, total pagu anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2022 adalah sebesar Rp31.263.700.000, terdiri dari kegiatan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (Rp30.069.995.000) dan layanan perkantoran (Rp1.193.705.000).

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Capaian Kinerja

4.1.1. Capaian Kinerja Output

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung-jawaban secara periodik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, penyampaian informasi atas capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja serta membandingkan realiasi kinerja dengan beberapa kriteria yang tercantum pada Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR dan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran, diperoleh informasi kualitas tingkat keberhasilan dan kegagalan serta faktor-faktor yang menghambat kinerja. Lebih lanjut, nilai kinerja berfungsi sebagai umpan balik guna melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Berdasarkan PK tahun 2022, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mendukung ketercapaian sasaran program berupa meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dan didukung oleh sasaran kegiatan berupa meningkatnya pelaksanaan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.



Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh data capaian nilai kinerja sebesar 105,25% atau surplus sebesar 5,25% dibanding target PK tahun 2022 (100%). Lebih lanjut, apabila hasil ini dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kinerja sebesar 4,45% (100,80%). Nilai tersebut berasal dari capaian delapan output kegiatan dan sesuai target Renstra 2020-2024. Tingkat capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2022

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100	105,25

Sumber: data diolah, 2022

Secara keseluruhan, keberhasilan kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 didukung oleh kontribusi capaian indikator kinerja kegiatan, yakni tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 48%, tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 25%, dan tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP sebesar 32,25%.

Dalam mendukung pencapaian target IKK ditemui beberapa kendala, antara lain: (1) terjadi perubahan PK dan DIPA sebanyak empat kali, menyebabkan terjadi penyesuaian pada realisasi anggaran dan jumlah pelaksanaan paket kegiatan, dan (2) pelaksanaan beberapa kegiatan kontraktual *Housing and Real Estate Information System*

(HREIS), seperti survei dan *forum group discussion* (FGD) tidak dapat dilaksanakan karena masih diberlakukannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di beberapa daerah.

Langkah-langkah strategis yang ditempuh untuk mengatasi kendala dan upaya dalam pencapaian kinerja adalah melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai PK dan penyelerasan terhadap alokasi anggaran berdasarkan DIPA, serta memaksimalkan penggunaan media informasi secara daring untuk mendukung kegiatan potensial sebagai langkah efisiensi. Oleh sebab itu, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan senantiasa melakukan peningkatan dan pengembangan program dan kegiatan, diantaranya terlihat pada: (1) kualitas pengelolaan data dan informasi melalui *website* simpul KPBU, pengembangan aplikasi *new* Sistem Informasi Registrasi Pengembang (*new* SIRENG) dan beberapa aplikasi sejenis lainnya, (2) inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja (*ex-post*) melalui penerapan analisis *input output* dalam rangka menilai dampak *multiplier* pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dan (3) penyusunan rencana umum proyek KPBU 2022-2024.

Meskipun pada 2023 diprediksi adanya ancaman resesi ekonomi global dan dapat berdampak terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menurunkan kinerja pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan optimis mampu mencapai kinerja setiap tahunnya sesuai target PK (100%). Adanya rencana lanjutan evaluasi kelembagaan organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada 2023 diharapkan akan menguatkan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

Pada 2023, terdapat upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada evaluasi lanjutan pelaksanaan paket-paket kegiatan potensial yang berlangsung di tahun sebelumnya.
2. Pemetaan paket kegiatan baru yang menunjang tugas dan fungsi.
3. Akselerasi kerjasama dan kemitraan terutama dalam hal dukungan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara.
4. Meningkatkan koordinasi antar K/L sebagai upaya mendorong pengembangan sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan yang berkelanjutan dan berkelanjutan.

5. Mengembangkan instrumen kebijakan pembiayaan infrastruktur alternatif, melalui kegiatan penelitian dan/atau kajian instrumen kebijakan pembiayaan infrastruktur bersama di bidang infrastruktur sumber daya air, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
6. Asesmen perencanaan secara berkala sesuai dengan target pada Renstra dan DIPA untuk memproyeksikan tingkat kualitas dan kebermanfaatan dari seluruh aktivitas yang dilakukan.
7. Meningkatkan integrasi pengelolaan data dan informasi pembiayaan infrastruktur bidang PUPR.
8. Meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap pelaporan kinerja.
9. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan proses bisnis.
10. penguatan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan mewujudkan konsep *money follow program* dan *valuer for money*.
11. Penerapan protokol kesehatan dalam menunjang kinerja setiap pegawai.



Workshop Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan DJPI TA 2022

Metode perhitungan atas capaian kinerja di atas terlampir. Untuk ringkasan *cascading* capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2 Cascading Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Jenis Indikator	DIPA (%)	Renstra (%)	Total Capaian DIPA (%)	Total Capaian Renstra (%)
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Indikator 1 (40%) Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%)	100	120	40	48
	Indikator 2 (30%) Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)	100	83,33	30	25
	Indikator 3 (30%) Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)	30	30	32,25	32,25
Hasil Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022				102,25	105,25

Sumber: data diolah, 2022

Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sebesar 105,25% mendukung tercapainya sasaran program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berupa Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Dukungan tersebut diukur berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program yakni Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

4.1.2. Capaian Kinerja *Outcome*

4.1.2.1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan salah satu alat penilaian yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dan dijadikan alat pengambilan kesimpulan akan kinerja yang ingin diteliti. Dengan adanya umpan balik ini, tingkat penerapan hasil pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur dapat dinilai dan hasil penilaian tersebut dapat menjadi rujukan pengambilan keputusan terhadap kualitas mutu pelayanan publik.

Penetapan indikator kinerja yang akan diukur dan dijadikan pertanyaan dalam kuesioner atau survei berdasarkan pemetaan model logika, yaitu: (1) indikator masukan (*input*) yang mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan, (2) indikator keluaran (*ouput*) digunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, (3) indikator hasil (*outcome*) digunakan untuk mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan, serta (4) indikator dampak (*impact*) yang menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner dari 30 responden, maka didapatkan hasil berikut ini:

Tabel 4. 3 Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Jenis Indikator	Jumlah Pertanyaan	2021		2022	
		Nilai (%)	Bobot (30 %)	Nilai (%)	Bobot (30 %)
Indikator Masukan	13	94,67	28,27	95,49	28,48
Indikator Keluaran	2	93,67		94,00	
Indikator Hasil	9	93,70		94,44	
Indikator Dampak	2	94,33		94,67	
Nilai Total Survei	26	94,23		94,95	

Sumber: data diolah, 2022

Dari tabel di atas, terlihat indikator keluaran memiliki nilai yang paling rendah diantara ketiga indikator lainnya. Adapun indikator keluaran terdiri dari:

- Pendapat mengenai jumlah layanan yang berupa kebijakan, strategi dan pengembangan sistem pada kegiatan penyiapan proyek KPBU bidang PUPR.
- Pendapat mengenai jumlah pelaksanaan kegiatan yang mendukung penyiapan proyek KPBU bidang PUPR.

Berdasarkan hasil kuesioner, apabila dibandingkan dengan hasil survei tahun 2021, Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami peningkatan yang positif. Nilai tertinggi terdapat pada indikator *input* sebesar 95,49%. Hal ini menandakan makin meningkatnya kualitas pegawai, efisiensi waktu pengerjaan, ketepatan waktu, alat bantu pengerjaan tugas yang makin memadai dan kejelasan prosedur dari layanan yang semakin baik.

Jika dilihat dari bobot indikator IKSP sebesar 30%, tingkat penerapan hasil mampu mencapai angka 28,48% dari nilai maksimal sebesar 30%. Hal ini menandakan Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PUPR sudah dijalankan dengan efektif dan efisien serta lebih baik dari tahun sebelumnya, namun masih ada ruang untuk dilakukan peningkatan mutu layanan sehingga mencapai tingkatan yang optimal.

4.1.2.2. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sebesar 105,25% juga turut mendukung tercapainya **Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Strategi, dan Kebijakan**. Indikator tersebut merupakan salah satu indikator di dalam Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Indikator Kinerja ini dihitung melalui penjumlahan dari indikator kontributor dengan bobot 30%, sedangkan metode perhitungannya dilakukan melalui survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan, dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Penetapan indikator kinerja dikembangkan dari nilai-nilai pada dimensi *service quality* yang kemudian dihubungkan dengan masing-masing cakupan penilaian. Dimensi

service quality terdiri dari lima nilai, yaitu; (1). *reliability* (keandalan), (2) *reponsiveness* (daya tanggap), (3) *assurance* (kepastian), (4) *emphaty* (empati), dan (5) *tangible* (berwujud). Dari lima nilai tersebut, terdapat batasan-batasan yang dinilai antara lain *man, method, money, resource, time*. Seluruh Nilai beserta batasan kemudian dituangkan dalam Survei. Pertanyaan-pertanyaan survei dibagi menjadi tiga kategori, yaitu; perencanaan, pelaksanaan dan hasil (*outcomes*). Berdasarkan hasil pengumpulan kuisioner dari 30 responden, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kategori	Jumlah Pertanyaan	2021		2022	
		Nilai (%)	Bobot (30%)	Nilai (%)	Bobot (30%)
Perencanaan	7	94,67	28,38	97,05	28,88
Pelaksanaan	6	93,67		96,00	
<i>Outcomes</i>	6	93,70		95,67	
Nilai Total Survei	19	94,23		96,28	

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan data di atas, hasil dari masing-masing kategori memiliki nilai yang saling berdekatan terutama pada kategori perencanaan dan pelaksanaan. Pada 2022, kategori yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah perencanaan. Pada kategori ini, hal-hal yang dinilai berkaitan dengan pemahaman dalam perencanaan kebijakan, kejelasan persyaratan administrasi, kejelasan prosedur layanan, kesesuaian tahapan dalam aktivitas perencanaan suatu sistem, perencanaan yang sesuai dengan anggaran, ketersediaan data sebagai acuan pembuatan sistem, dan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan.

Hasil perhitungan sebesar 28,88% menandakan bahwa Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Strategi, dan Kebijakan mengalami kenaikan 0,5% dari nilai tahun lalu sebesar 28,38%, meskipun demikian peningkatan ini masih dapat dioptimalkan kembali dengan meningkatkan kualitas pengembangan sistem, strategi, dan kebijakan agar hasil dari pengembangan tersebut menimbulkan dampak yang signifikan bagi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur bidang PUPR.

4.2. Perbandingan Kinerja

Perbandingan kinerja bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi atas keberhasilan dan/atau kegagalan sesuai target yang diperjanjikan pada tahun berjalan. Pada laporan kinerja ini disajikan perbandingan dalam beberapa aspek, antara lain:

- Realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- Realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- Realisasi kinerja dengan standar nasional; dan
- Realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.

4.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya menggunakan data tahun 2020 hingga 2022. Berdasarkan data tersebut, diperoleh hasil bahwa kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2022, nilai capaian kinerja berhasil surplus sebesar 5,25% dari target (100%). Apabila dibandingkan dengan kinerja dua periode sebelumnya, kualitas capaian kinerja yang berasal dari delapan *output* kegiatan mampu mendukung akselerasi ketercapaian IKK.



Tabel di bawah ini menggambarkan capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan selama tiga periode.

Tabel 4. 5 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2022

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (%)		
					2020	2021	2022
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100	98,13	100,80	105,25

Sumber: data diolah, 2022

Jika dilihat secara detail, target PK Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan selama tiga tahun berjalan adalah sebesar 100%. Berdasarkan target tersebut, perkembangan capaian kinerja tidak mengalami fluktuasi dan tren meningkat, meskipun terdapat perubahan pada paket kegiatan tiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan juga dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

1. Tidak selarasnya antara target kinerja dan alokasi pagu anggaran sesuai Renstra menyebabkan beberapa paket kegiatan di tahun berjalan tidak dapat direalisasikan.
2. Revisi PK dan DIPA sebanyak empat kali dalam satu tahun menyebabkan ketidaksinkronan realisasi atas pertanggung jawaban sesuai rencana aksi.
3. Belum optimalnya penyusunan desain program kerja yang diselaraskan dengan proses perencanaan anggaran, serta adanya pengaruh perubahan kebijakan/prioritas, contohnya penanganan Covid-19 dan *automatic adjustment*.

Untuk mendukung strategi dan pengelolaan kinerja, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala, baik dari sisi manajemen hingga proses pelaksanaan sistem dan kebijakan.
2. Menerapkan dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai, bertujuan mengidentifikasi kelemahan, menjalin komunikasi, menemukan potensi dan memperbaiki kinerja di tahun selanjutnya.

3. Menetapkan dan menyeleksi kegiatan prioritas berbasis *output* yang diselaraskan dengan Renstra, Renja dan DIPA.
4. Pengembangan kompetensi pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan guna mendukung SDM yang kompetitif serta memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku Insan PUPR.

Pada 2023, terdapat upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada evaluasi lanjutan pelaksanaan paket-paket kegiatan potensial yang berlangsung di tahun sebelumnya.
2. Pemetaan paket kegiatan baru yang menunjang tugas dan fungsi.
3. Akselerasi kerjasama dan kemitraan terutama dalam hal dukungan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara.
4. Meningkatkan koordinasi antar K/L sebagai upaya mendorong pengembangan sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan yang berketahanan dan berkelanjutan.
5. Mengembangkan instrumen kebijakan pembiayaan infrastruktur alternatif, melalui kegiatan penelitian dan/atau kajian instrumen kebijakan pembiayaan infrastruktur bersama di bidang infrastruktur sumber daya air, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
6. Asesmen perencanaan secara berkala sesuai dengan target pada Renstra dan DIPA untuk memproyeksikan tingkat kualitas dan kebermanfaatan dari seluruh aktivitas yang dilakukan.
7. Meningkatkan integrasi pengelolaan data dan informasi pembiayaan infrastruktur bidang PUPR.
8. Meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap pelaporan kinerja.
9. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan proses bisnis.
10. Penguatan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan mewujudkan konsep *money follow program dan valuer for money*.
11. Penerapan protokol kesehatan dalam menunjang kinerja setiap pegawai.

4.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah menggunakan data capaian tahun 2020-2022 dan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024. Berdasarkan data tersebut, diperoleh informasi bahwa terdapat dua kegiatan yang sudah melebihi target, yaitu: (1) Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan (167%), dan (2) Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan (200%).

Sementara itu, terdapat empat kegiatan yang sudah mencapai angka 50%, antara lain: (1) Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (62%), (2) Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (50%), (3) Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (50%), dan (4) Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (68%). Sedangkan, kegiatan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan belum mampu mencapai nilai 50% dari target.

Dalam mencapai target jangka menengah, terdapat beberapa kondisi dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Keterbatasan alokasi anggaran di tahun berjalan dengan yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 menyebabkan penundaan beberapa rencana kegiatan di 2022.
2. Perubahan kebijakan dan penyesuaian peraturan mempengaruhi target dan realiasi di tahun berjalan.
3. Realokasi anggaran untuk bimbingan teknis (Bimtek) mempengaruhi ketidaktercapaian realisasi pada kegiatan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
4. Kegiatan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tidak dapat dilakukan tahun 2022 dikarenakan telah dialokasikan pada tahun sebelumnya, dan adanya keterbatasan anggaran.
5. Dokumen Renstra 2020-2024 tidak dapat dilakukan revisi sehingga masukan/perubahan target masing-masing kegiatan hanya dapat diakomodir melalui dokumen evaluasi paruh waktu Renstra Direktorat Jenderal

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2022.

Untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja di 2022, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melakukan langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan Renja tahunan diselaraskan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024.
2. Kinerja *output* (KRO/RO) telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024.
3. Kinerja proyek KPBU dan bantuan pembiayaan perumahan mendukung target yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024.

Pada 2023, upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah menyelesaikan kegiatan yang belum terlaksana di tahun-tahun sebelumnya untuk mengejar target Renstra 2020-2024.



Tabel 4. 6 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2022 dengan Target Jangka Menengah

No	Output Kegiatan	Satuan	Target Renstra 2020-2024	Realisasi (%)				Progres Capaian (%)
				2020	2021	2022	TOTAL	
1	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	1	3	1	5	167%
2	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	29	7	5	6	18	62%
3	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	29	5	4	4	13	45%
4	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK	5	2	0	0	2	40%
5	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	0	2	200%
6	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	12	0	3	3	6	50%
7	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	20	5	4	1	10	50%
8	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	19	7	3	3	13	68%

Sumber: data diolah, 2022

4.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional menggunakan acuan RPJMN 2020-2024. Berdasarkan Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2022-2024, terdapat kegiatan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Berdasarkan hasil

identifikasi Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, terdapat risiko dinamisasi perubahan *pipeline* proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, sehingga inovasi pengendalian di 2022 adalah penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU TA. 2023. Hal ini sebagai wujud komitmen mendukung ketercapaian RPJMN 2020-2024.

Berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 641 tentang Penetapan Simpul KPBU di Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai Simpul KPBU bertugas menyusun Rencana Umum Proyek KPBU jangka waktu lima tahun, sebagai upaya mendukung pencapaian pembangunan infrastruktur untuk mendukung Visi Indonesia 2045 melalui skema pembiayaan alternatif yaitu KPBU. Kementerian PUPR mengamanatkan untuk melakukan penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU pada Tahap Perencanaan KPBU berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dalam menyusun Rencana Umum Proyek KPBU bidang PUPR terdapat isu dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Perubahan formulasi isu atau substansi dalam Rencana Umum Proyek KPBU bidang PUPR yang direncanakan akan dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Dirjen Pembiayaan Infrastruktur.
2. Perubahan bentuk legalisasi (produk hukum) yang akan mengatur Rencana Umum Proyek KPBU bidang PUPR, semula berbentuk Keputusan Direktur Jenderal diubah menjadi Keputusan Menteri PUPR.
3. Perubahan Metodologi/Mekanisme *screening tools* proyek KPBU bidang PUPR yang akan tertuang dalam Rencana Umum Proyek KPBU bidang PUPR.
4. Belum terdapat tata cara teknis pemilihan proyek KPBU berdasarkan kriteria/*eligibility rule*, sehingga pemahaman masing-masing masih berbeda-beda.
5. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang disusun oleh BPIW sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR tidak menghasilkan *long list* proyek namun arahan program kedepan.

6. Tidak terdapat peraturan yang mengatur terkait dengan komitmen Unit Organisasi Teknis di Kementerian PUPR terhadap pengalokasian anggaran khusus untuk pelaksanaan Program KPBU (pembayaran *availability payment* (AP)), pengadaan lahan, dan lain sebagainya) tahunan.
7. Kurangnya pemahaman terhadap proses bisnis KPBU.
8. Jumlah tenaga ahli (ekspertis) dalam penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU.
9. Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU bidang PUPR memerlukan koordinasi dengan banyak pemangku kepentingan, namun anggaran koordinasi yang tersedia terbatas.

Pada 2022, penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU telah melalui beberapa koordinasi baik dari internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, hingga unit organisasi teknis di Kementerian PUPR maupun K/L lain, seperti Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, tersusun draf Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Rencana Umum Proyek KPBU di lingkungan Kementerian PUPR tahun 2022-2024 yang berisi pengaturan sebagai berikut:

1. Rencana Umum KPBU tahun 2022-2024 merupakan bagian dari rencana strategis dari masing-masing unit organisasi eselon I yang memiliki kewenangan menjalankan tugas dan fungsi terhadap infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rencana Umum KPBU tahun 2022-2024 menjadi acuan untuk pengajuan daftar proyek ke dalam daftar Rencana KPBU yang ditetapkan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan setiap tahunnya.
3. Dalam hal terdapat proyek KPBU yang ditugaskan dan/atau atas direktif Presiden Republik Indonesia dan/atau Menteri dan belum tercantum dalam Rencana Umum, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terlebih dahulu berkoordinasi dengan unit organisasi teknis terkait untuk mencantumkan proyek tersebut pada Rencana Umum.

4. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengevaluasi Rencana Umum Proyek KPBU di lingkungan Kementerian PUPR tahun 2022-2024 secara periodik minimal satu tahun sekali.
5. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melaporkan evaluasi secara berkala kepada Menteri.
6. Masing-masing unit kerja di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyusun jadwal pelaksanaan Proyek KPBU dan melaporkan ke Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Rencana Umum Proyek KPBU di lingkungan Kementerian PUPR tahun 2022-2024 telah diidentifikasi Rencana Umum Proyek KPBU berdasarkan masing-masing sektor yang dikategorikan berdasarkan masing-masing tahapan KPBU. Informasi Rencana Umum Proyek KPBU antara lain mencakup: nama proyek, PJPK, bentuk KPBU, output, besaran investasi, nilai AP (per tahun selama masa layanan), masa layanan, dan target lelang.

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU TA 2023, adalah:

1. Melakukan pembahasan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur terkait arahan *output* (produk hukum) Rencana Umum proyek KPBU di lingkungan Kementerian PUPR tahun 2022-2024.
2. Melakukan pembahasan dengan unit kerja di DJPI terkait dengan kriteria penetapan proyek KPBU yang akan masuk ke dalam Rencana Umum Proyek KPBU, serta daftar (*pipeline*) proyek KPBU yang akan masuk ke dalam Rencana Umum Proyek KPBU.
3. Menyusun tata kelola (*framework*) *public private partnership* (PPP) pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur sebagai kajian perbaikan bisnis proses KPBU di Kementerian PUPR.
4. Sebanyak lebih dari 150 pegawai di Kementerian PUPR telah diikutsertakan pada APMG PPP *Certificaton Program/CP3P* (*Certified Public-private Partnerships Professional*) sebagai upaya *capacity building* KPBU.

Pada 2023, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan akan merealisasikan langkah strategis berikut:

1. Penyesuaian produk hukum atau *output* Rencana Umum Proyek KPBU di lingkungan Kementerian PUPR ke dalam bentuk Keputusan Menteri PUPR. Hal ini berguna sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan KPBU bagi seluruh unit organisasi di Kementerian PUPR.
2. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bersama unit organisasi teknis di Kementerian PUPR melakukan pembahasan intensif mengenai usulan proyek strategis yang akan dicantumkan ke dalam Rencana Umum KPBU.

4.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja di level Nasional

Perbandingan realisasi kinerja di level nasional menggunakan data capaian kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan. Sesuai PK 2021, terdapat dua *output* kegiatan yang sama diantara Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan. Kontribusi hasil capaian kinerja kedua direktorat mendukung Sasaran Strategis 5 (SS-5) Kementerian PUPR **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya**, melalui sasaran program Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya, dan Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Secara keseluruhan, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan mampu mencapai target sesuai PK 2021, namun untuk mendukung tercapaian kinerja, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dihadapkan oleh berbagai permasalahan, antara lain:

1. *Refocusing* anggaran yang dilakukan beberapa kali menyebabkan proses penyerapan anggaran menjadi terhambat.
2. Kebijakan PPKM menyebabkan tidak teralisasinya penyerapan anggaran beberapa paket kontraktual dan hal ini juga berpengaruh terhadap akurasi hasil survei.

3. Penyesuaian waktu kerja dan terhambatnya koordinasi kerja antar pegawai karena penerapan sistem *work from home* (WFH).

Dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan di 2021 serta untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan telah menerapkan beberapa langkah antisipatif, yakni:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan kontraktual sesuai yang tercantum pada kerangka acuan kerja (KAK) dan rencana anggaran biaya (RAB).
2. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan agar terlaksananya *whole of government*.
3. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan agar penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai rencana aksi.
4. Peningkatan mutu baik dari segi kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan bagi pegawai baik PNS maupun non PNS.
5. Melaksanakan evaluasi paruh waktu Renstra tingkat eselon II di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.



Tabel 4. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja di Level Nasional

Output Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Persentase
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	6	6	100%
	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	6	100%
SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni					
Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Strategi, Program, dan Penganggaran	Laporan	10	10	100%
	Kemitraan dan Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	4	4	100%

Sumber: data diolah, 2022

4.3. Realisasi Anggaran

4.3.1. Realisasi Anggaran

Penggunaan anggaran merupakan komponen penting atas estimasi kinerja yang diselaraskan dengan penganggaran selama tahun berjalan. Ukuran keberhasilan suatu organisasi tergambar dari kualitas perencanaan, pengendalian dan capaian *output/outcome*. Selama 2022, realiasi penyerapan anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sebesar Rp28.977.085.000 (96,37%) dari total pagu sejumlah Rp30.069.995.000. Realisasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 85,14% (Rp27.878.008.000) dari total pagu sejumlah Rp32.743.044.000. Pada 2022, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan didukung oleh tiga klasifikasi *rincian output* (KRO), yakni: (1) Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, (2) Layanan Dukungan Manajemen Internal, dan (3) Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Secara keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran terbesar berasal dari *rincian output* (RO) Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, melalui paket kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 (99,98%), Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi

Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2023 (99,20%), Penyusunan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020-2024 (99,65%), dan Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU TA. 2023 (99,79%). Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
2. Kerjasama *multilateral meeting*, *bilateral meeting*, dan *trilateral meeting* antara Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dalam hal program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan program Dukungan Manajemen.
3. Keterpaduan koordinasi pengembangan infrastruktur wilayah (Rakorbangwil), konsultasi regional (Konreg) dan Rapat Dengar Pendapat/Rapat Evaluasi (RDP) dengan anggota komisi V DPR RI.
4. Penetapan proyek pada rencana umum KPBU atas dasar hasil kesepakatan unit kerja di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, unit organisasi teknis di Kementerian PUPR, serta *stakeholder* eksternal.
5. Penyelenggaraan rutin pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin kepada seluruh pegawai.

Pada 2023, terdapat beberapa strategi yang akan dilakukan guna mendukung keberhasilan penyerapan realisasi anggaran di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis *money follow program* dan *value for money*, bertujuan menciptakan efektivitas dan efisiensi.
2. Mempercepat pelaksanaan proyek KPBU yang akan *financial close* di 2023.
3. Mempercepat finalisasi penyusunan Rencana Umum KPBU.
4. Mengembangkan potensi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.
5. Mengakomodasi pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pembangunan IKN.
6. Mengoptimalkan alokasi penggunaan pagu anggaran ke dalam kegiatan strategis yang mendukung ketercapaian Renstra 2020-2024.

Pada 2022, *rincian output* (RO) Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan, melalui paket kegiatan *Grand Design* HREIS memiliki

realisasi paling rendah diantara paket kegiatan lainnya, dengan realisasi keuangan sebesar 84,41% dan realisasi fisik sebesar 100%. Sebagai informasi, penyelenggaraan HREIS dilakukan secara kontraktual *multi years*, dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pelaksanaan HREIS telah berakhir pada Maret 2022 dengan *output* berupa *grand design* HREIS.

Tantangan dalam penyerapan anggaran disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan *pilot project* penyusunan *housing queue* melalui aplikasi RumahQu di tiga provinsi, yakni: Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan tidak terealisasi secara maksimal akibat adanya pandemi Covid-19 yang menghambat penyelenggaraan kegiatan secara luring (*offline*), sehingga kegiatan tersebut lebih banyak diselenggarakan secara daring (*online*).

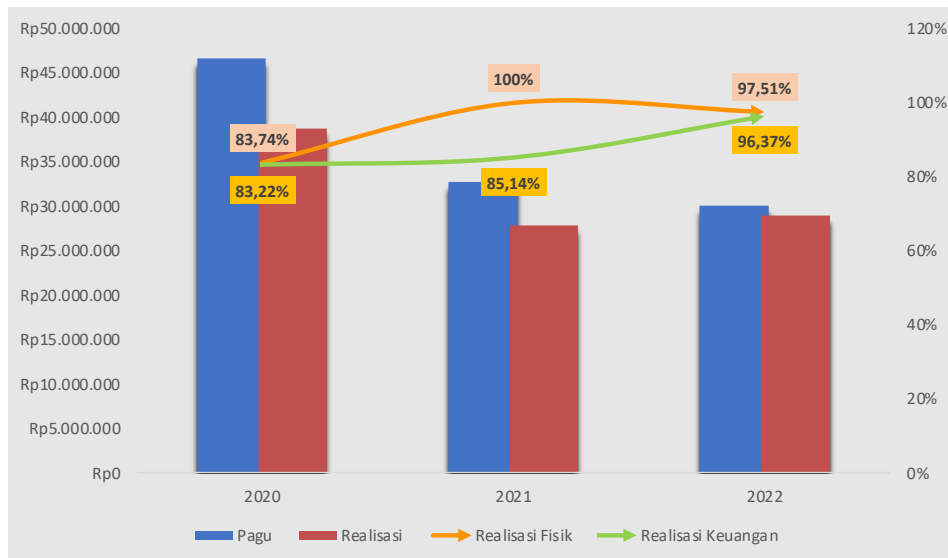
Pada 2023, kegiatan HREIS akan dilanjutkan dengan pengelolaan data, mencakup:

1. Pembaharuan data yang sudah tersedia di laman (*website*), terdiri dari data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS), data Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data realisasi subsidi bantuan perumahan, dan beberapa data pendukung lainnya.
2. Meningkatkan koordinasi antara K/L perihal akuisisi data perumahan.
3. *Transfer knowledge* pengelolaan data HREIS kepada Tim Pengelola laman (*website*) HREIS.

4.3.2. Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi anggaran tahun berjalan dengan realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya bertujuan untuk mengevaluasi sinergi tingkat kualitas perencanaan, penganggaran dan kinerja, serta mengukur tingkat kesinambungan antara kebijakan alternatif dan kegiatan strategis atas penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan dengan mempertimbangkan kemampuan penganggaran yang bersumber dari APBN dan PHLN. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan berkomitmen melakukan penguatan efisiensi dan efektivitas dengan penekanan anggaran berbasis hasil (*result based*). Perbandingan Realiasi penyerapan terhadap pagu periode 2020-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 4. 1 Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022



Sumber: i-emonitoring PUPR, data diolah, 2022

Secara umum, penyerapan anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 11% dibanding tahun sebelumnya. Namun, pada grafik di atas terlihat bahwa capaian tahun 2021 tidak seoptimal tahun 2020 dan 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya revisi DIPA dan blokir anggaran khususnya *automatic adjustment* yang mengakibatkan beberapa paket kegiatan mengalami penundaan yang pada akhirnya mempengaruhi penyerapan anggaran. Hal ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pelaksanaan efisiensi penggunaan anggaran, seperti pengadaan yang bersifat langsung, paket rapat (*meeting*), honorarium dan biaya perjalanan dinas. Selain itu, hal ini disebabkan oleh percepatan penarikan PHLN *National Affordable Housing Program* (NAHP), dan pemotongan anggaran sebagai bentuk penanganan tanggap darurat bencana Covid-19.

Berdasarkan data *i-emonitoring* PUPR, realisasi anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara tepat, terstruktur, efektif dan efisien. Pada 2022, terdapat tiga KRO yang menunjang kinerja anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, yaitu: (1) Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, (2) Layanan Dukungan Manajemen Internal, dan (3) Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Apabila diklasifikasi per KRO, realisasi penyerapan anggaran dalam periode 2020-2022 terbesar adalah Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, dengan tren peningkatan sebesar 10%. Pertumbuhan positif tersebut selain didorong oleh meningkatnya alokasi pagu anggaran setiap tahunnya, beberapa paket kegiatan diselenggarakan melalui kerja sama kontraktual, yaitu: (1) HREIS, (2) *PMC Firm to Support DGIF for Public Works and Housing with Implementation of The Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services Project*, dan (3) Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Namun demikian, pertumbuhan negatif terjadi pada KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar 5% yang disebabkan oleh terjadinya revisi DIPA sebanyak empat kali, sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian terhadap pelaksanaan beberapa paket kegiatan yang pada akhirnya mempengaruhi penyerapan anggaran. Selain itu, kinerja anggaran yang berasal dari KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal turun sebesar 4% karena adanya *automatic adjustment* sejumlah Rp400.000.000 pada paket kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Bidang PUPR.

4.3.3. Efisiensi Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan pada 2022 dilaksanakan sebagai bentuk penguatan tata kelola dan upaya meningkatkan pertanggungjawaban atas perencanaan dan penganggaran berbasis pengelolaan kinerja. Bentuk efisiensi penggunaan anggaran salah satunya terlihat dari jumlah alokasi pagu anggaran setiap tahunnya. Kebijakan penyesuaian pagu anggaran tersebut memperhatikan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-617/MK.02/2022 tentang Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2023. Sejak 2020, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menerapkan redesain sistem penganggaran dan memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan melalui konsep *money follow program* dan *value for money*.

Hasil evaluasi ini bertujuan menunjang pemetaan kinerja pegawai, serta mengukur tingkat ketercapaian Renstra 2020-2024. Selain itu, melalui proses redesain sistem penganggaran berdampak terhadap jumlah paket kegiatan yang lebih sedikit, namun lebih fokus dan mencerminkan program riil yang didukung oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu Program Dukungan Manajemen. Berdasarkan data *i-monitoring* PUPR, realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp28.977.085.000 dari total pagu sejumlah

Rp30.069.995.000 atau terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.092.910.000.

Dalam proses efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan penghematan, yaitu penghematan atau pengurangan besaran dari Belanja Birokrasi, meliputi Belanja Bahan, Belanja Honorarium termasuk Honorarium *Output* Kegiatan, Honorarium Tim Kegiatan dan Honorarium Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Paket *Meeting*. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan juga mendukung kebijakan negara untuk realokasi anggaran *automatic adjusment* ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp537.128.000.

4.4. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Berikut merupakan upaya efektivitas dan efisiensi yang diterapkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan selama 2022 dengan tetap memperhatikan pencapaian yang optimal atas pelaksanaan anggaran dan kinerja, antara lain:

1. Mendorong digitalisasi keterpaduan pelaporan dan inputing data kinerja serta pertanggung jawaban anggaran pada sistem informasi eksisting, antara lain: Krisna Bappenas-Kemenkeu, Sakti Kemenkeu, *i-eMonitoring* PUPR, SiRUP-LPSE LKPP, e-Sakip PUPR dan *Smart* DJA Kemenkeu.
2. Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan secara luring di luar kantor mempertimbangkan skala prioritas dan berbasis anggaran, sehingga beberapa kegiatan strategis banyak dilakukan secara daring dan memanfaatkan ruang rapat kerja yang tersedia di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
3. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Dari sisi anggaran, dengan realisasi anggaran mencapai 96,37%, berhasil mencapai kinerja sebesar 105,25%. Artinya, pelaksanaan kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran mendukung ketercapaian target dalam PK 2022.
5. Pengelolaan dokumen naskah dinas elektronik dan pemanfaatan laman (*website*) dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagai proses penyempurnaan strategi serta kebijakan di tahun berikutnya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan efektivitas dan efisiensi di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Lambatnya penyerapan anggaran di awal tahun disebabkan oleh perubahan pejabat perbendaharaan di Satuan Kerja (Satker) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Belum optimalnya proses perencanaan sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran.
3. Pemusatan anggaran (*refocusing anggaran*) menyebabkan revisi DIPA sebanyak empat kali sehingga mengganggu sistem penganggaran dan kualitas rencana aksi.

Selama tahun 2022, terdapat hal-hal yang dilakukan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan untuk menunjang keberhasilan efektivitas dan efisiensi, antara lain:

1. Mempercepat pelaksanaan paket kegiatan yang didukung dengan peningkatan pengawasan dan pengendalian melalui pemantauan manajemen risiko tingkat eselon II (UPR T-2) setiap triwulan.
2. Monitoring dan evaluasi rutin atas ketercapaian dan/atau kegagalan kinerja melalui aplikasi *i-eMonitoring* dan e-Sakip Kementerian PUPR.
3. Implementasi forum grup diskusi (*forum group discussion*) dan berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*), baik secara internal maupun bersama pemangku kepentingan lainnya, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan BP Tapera, bertujuan mengidentifikasi kendala utama serta menemukan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan.
4. Membudayakan dialog kinerja yang konstruktif antara pimpinan dan pegawai sebagai wujud kepedulian (*awareness*) dan komitmen terhadap pengelolaan kinerja berdasarkan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
5. Melaksanakan kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan *Accelerating Infrastructure Delivery Through Better ESP Asian Development Bank* (ADB).

Pada 2023, upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan akan berfokus pada: (1) penyelesaian target Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dan kontribusi terhadap Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024, (2) penguatan manajemen kinerja, (3) percepatan pelaksanaan tugas, (4) efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas proses bisnis, (5) penguatan koordinasi dengan *stakeholders* dalam rangka percepatan target kinerja, dan (6) mendorong penguatan budaya reformasi birokrasi.

4.5. Analisis Dampak dan Manfaat

Sesuai dengan tugas Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan yakni penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, kinerja yang diperoleh dari pelaksanaan anggaran 2022 bertujuan dalam rangka mendukung capaian target Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai Renstra 2020-2024. Berikut diuraikan beberapa manfaat kinerja *output* yang dimaksud, antara lain:

1. Tersusunnya *draft* keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Rencana Umum Proyek KPBU di lingkungan Kementerian PUPR tahun 2022-2024 sebagai acuan untuk pengajuan daftar proyek ke dalam daftar rencana KPBU yang ditetapkan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan setiap tahunnya.
2. Tersusunnya *draft* dokumen evaluasi paruh waktu (EPW) Renstra Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2022 sebagai pedoman penilaian terhadap capaian target, berupa target capaian kinerja, target pelaksanaan kegiatan, target pengalokasian anggaran serta realisasi kerangka regulasi dan kelembagaan pada tahun berjalan, serta sejalan dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian PUPR 2020-2024.

3. Tersusunnya buku Profil Risiko Proyek Peremajaan Permukiman Kumuh dan Transformasi Hunian Tapak ke Vertikal di Kota Bandung sebagai salah satu bahan kebijakan bagi badan usaha dalam memahami risiko pembiayaan infrastruktur bidang permukiman.
4. Tersusunnya buku Profil Risiko Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung sebagai salah satu bahan kebijakan bagi badan usaha dalam memahami risiko pembiayaan infrastruktur bidang perumahan.
5. Terselenggaranya pemantauan manajemen risiko unit pemilik risiko tingkat satu (UPR T-1) dan unit pemilik risiko tingkat dua (UPR-T2) setiap triwulan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengendalian dalam rangka memastikan tercapainya sasaran program/kegiatan yang tercantum dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai Renstra 2020-2024.
6. Terselenggaranya pemantauan kinerja dan evaluasi (*ex-post*) melalui analisis *input output* dalam menilai dampak *multiplier* (ekonomi) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
7. Pengelolaan data dan layanan sistem informasi bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yakni: (1) laman Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (2) aplikasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), (3) aplikasi Sistem Informasi Proyek KPBU atas Prakarsa Badan Usaha (SI-PRABU), (4) aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU (SIPADU), (5) aplikasi Sistem Informasi Manajemen Proyek Unggulan KPBU (SIMPUL KPBU), (6) layanan *hosting server* Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan (7) aplikasi Sistem Informasi Registrasi Pengembang (New SIRENG).

4.6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan atas pencapaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022, antara lain yaitu:

1. Substansi kebijakan jelas dan terukur, serta pengimplementasian mudah dipahami dan didukung dengan telah diterapkannya pelaksanaan dialog kinerja.

2. Pengendalian dan pengawasan kinerja didukung oleh adanya proses mitigasi risiko yang diterapkan oleh Sub Direktorat Kepatuhan Intern.
3. Pelaksanaan *Project Management Committee Engineering Services Project* dibiayai dengan PHLN yang mendukung kegiatan: (1) penyiapan standar dokumen *final business case* (FBC) proyek KPBU, (2) penyiapan standar perjanjian kerjasama proyek KPBU, (3) penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi (APMG CP3P) dalam rangka pengembangan kapasitas SDM dalam bidang KPBU, dan (4) *Grand Design Housing and Real Estate Information System* (HREIS).

Tantangan dalam rangka pencapaian keberhasilan kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022, antara lain yaitu:

1. Alokasi anggaran yang terbatas mempengaruhi optimalisasi perencanaan dan ekspansi kerjasama terhadap investasi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
2. Permintaan atas penilaian survei tingkat kualitas pengembangan sistem, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dan survei tingkat penerapan hasil pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan belum sepenuhnya mengakomodir saran dan kritikan dari seluruh pemangku kepentingan.
3. Pengelolaan sistem informasi masih membutuhkan pengintegrasian data dengan K/L lainnya.

Pada 2023, upaya peningkatan keberhasilan capaian di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan akan berfokus pada hal-hal berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penganggaran yang disertai dengan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap kualitas *output* dari paket-paket kegiatan yang biayai oleh APBN dan PHLN.
2. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan survei di tahun berikutnya.
3. Meningkatkan konsolidasi dan kerja sama dengan K/L lain guna mendukung pengintegrasian data pada layanan sistem informasi dan kegiatan strategis.
4. Menyelesaikan target Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dan kontribusi terhadap Renstra Direktorat



Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024.

Berikut diuraikan beberapa kontribusi dan capaian atas keberhasilan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan selama tahun 2022, antara lain:

1. Peningkatan kerja sama dengan investor luar negeri dalam pembiayaan kreatif infrastruktur bidang PUPR, diantaranya: nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) Tahap II antara ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Turki dengan PT Hutama Karya terkait pembiayaan Jalan Tol Trans Sumatera, *Cooperation Framework Agreement on the Variable Capital Company for Infrastructure Investment Projects in Indonesia* dengan China Railway Construction Corporation (CRCC) *International Investment*, serta peninjauan kerjasama investasi bidang air limbah dengan perusahaan Abu Dhabi dan Brunei Darussalam.
2. Dukungan pelaksanaan proyek infrastruktur bidang PUPR dengan skema KPBU yang tercantum dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui permohonan pemberian relaksasi perlakuan perpajakan kepada Menteri Keuangan untuk beberapa skema dukungan pemerintah, yakni: (1) skema kontrak operasi dan pemeliharaan, (2) skema *supported build operate transfer* (SBOT) dan beberapa skema lainnya, yang dikenakan ketentuan perpajakan sehingga menurunkan tingkat kelayakan investasi proyek.
3. Optimalisasi perencanaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dengan skema KPBU melalui penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU di lingkungan Kementerian PUPR yang bertujuan untuk penetapan proyek yang akan disiapkan dengan skema KPBU sejak awal, serta dimaksudkan sebagai acuan bagi pimpinan unit organisasi yang mendapat delegasi dari Menteri PUPR untuk menyiapkan anggaran sepanjang tahapan KPBU (perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjian KPBU), termasuk mengalokasikan anggaran untuk menyiapkan *availability payment*, maupun dukungan konstruksi, serta sebagai *pipeline* proyek KPBU bidang PUPR yang akan disiapkan sampai dengan 2024.
4. Dukungan strategi atas perencanaan hingga pengendalian dalam penerapan skema pembiayaan KPBU Syariah dengan mempertimbangkan besarnya potensi pembiayaan syariah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan

infrastruktur, dan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terdapat dua *pilot* proyek KPBU Syariah sektor Sumber Daya Air (SDA) yaitu: (1) Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi *High Level Diversion* (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan (2) Daerah Irigasi (DI) Komering, Sumatera Selatan. Kedua proyek tersebut saat ini sedang dalam proses penyusunan *Feasibility Study* (FS) oleh PT Brantas Abipraya sebagai Badan Usaha Pemrakarsa.

5. MoU antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pekerjaan Umum dan Perumahan.
6. Terimplementasinya *Housing and Real Estate Information System* (HREIS) yang dirancang untuk mengelola data-data perumahan di Indonesia, dan selanjutnya data tersebut dianalisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga dan pembiayaan perumahan.
7. Koordinasi antara Kementerian PUPR c.q Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan *Centre for Urban and Regional Research* (CentUR) Radboud University bertujuan untuk mengembangkan instrumen kebijakan pembiayaan infrastruktur alternatif/kreatif, melalui kegiatan: (1) penelitian dan/atau kajian bersama terkait instrumen kebijakan pembiayaan infrastruktur, dan (2) peningkatan kapasitas di bidang infrastruktur sumber daya air, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
8. Terpenuhinya syarat kelengkapan dokumen validasi atas keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) unit kerja oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.
9. Keterlibatan dalam pemantauan penerapan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hasil evaluasi implementasi manajemen risiko tahun 2021 mendapatkan nilai sebesar 75,39% (level 4-terkelola dan terstruktur).
10. Mendukung terselenggaranya budaya pengendalian gratifikasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui kegiatan: (1) sesi berbagi ilmu (*sharing session*) anti gratifikasi, (2) koordinasi penyusunan program pengendalian gratifikasi (PPG), dan (3) Sosialisasi survei

penilaian integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) budaya anti gratifikasi.

11. Keterlibatan sebagai Tim penilai dalam memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern yang mendukung keandalan pelaporan keuangan. Tim penilai telah menyusun laporan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) sejak tahun 2020 dengan nilai capaian efektif.
12. Mendukung kegiatan fasilitasi kerja sama KfW *Development Bank* melalui *Support for Infrastructure Investments in Indonesia Program* hingga tersalurkannya bantuan teknis berupa penyusunan studi pendahuluan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam rangka pembangunan rumah susun Sadang Serang.
13. Mendukung kegiatan fasilitasi kerja sama antara Kementerian PUPR dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“SIG”) terkait komitmen dan sinergi dalam mendukung tercapainya penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, hingga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
14. Mendukung percepatan penandatanganan akad Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) *green housing gandumland city* dan simbolis penyerahan kunci rumah bagi penerima manfaat.

Pada 2022 terdapat beberapa kegiatan yang ditargetkan dalam rencana aksi belum optimal dalam hal pelaksanaan maupun kontribusinya terhadap tingkat keberhasilan kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyepakatan ruang lingkup Badan Layanan Umum (BLU) sebagai Unit di Kementerian PUPR yang dapat mengakomodir pembiayaan mikro perumahan, *Paying Agent* KPBU dan pengelolaan dana konversi.
2. Fasilitasi penyiapan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang penugasan kepada Perum Perumnas untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penataan kawasan permukiman.
3. Penyusunan kajian *credit scoring* melalui data Telko bagi calon penerima bantuan KPR subsidi sektor informal.
4. Inisiasi PKS Kementerian PUPR dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka memfasilitasi kegiatan Akreditasi, Registrasi, dan Sertifikasi

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang Perumahan (ARSAP4).

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian rencana aksi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022, antara lain yaitu:

1. Rencana pemberian mandat dan penyepakatan ruang lingkup BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebagai unit pengelola dan penyaluran pembiayaan mikro tidak dapat dilaksanakan karena dana sejumlah Rp2 Triliun yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) harus dikembalikan kepada negara dan kelembagaan BLU PPDPP harus dilikuidasi sesuai arahan dari Kementerian Keuangan. Disamping itu, apabila Kementerian PUPR ingin membentuk BLU baru sebagai unit pengelola dan penyaluran pembiayaan mikro, harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan tata cara pembentukan BLU sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Penyiapan Raperpres tentang penugasan kepada Perum Perumnas untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penataan kawasan permukiman telah dilakukan finalisasi kajian pendukung dan saat ini sedang tahap konfirmasi persetujuan oleh Kementerian Keuangan.
3. Penyusunan kajian *credit scoring* melalui data Telko bagi calon penerima bantuan KPR subsidi sektor informal masih dalam tahap analisa dan uji coba antara BTN dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
4. Inisiasi PKS Kementerian PUPR dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka memfasilitasi kegiatan Akreditasi, Registrasi, dan Sertifikasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang Perumahan (ARSAP4) dalam tahap penyiapan revisi MoU serta perluasan ruang lingkup.

4.7. Kinerja Lain-Lain

Sebagai upaya penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan capaian kinerja, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan memiliki kinerja lainnya selain yang tertera di dalam satu sasaran kegiatan dan satu indikator kinerja kegiatan. Kinerja yang dimaksud adalah kinerja yang tidak termasuk dalam kontrak kinerja 2022, namun mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Penentuan kinerja lainnya Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 didasarkan atas inisiasi pelaksanaan kegiatan serta pengembangan dan penggunaan beberapa alat kerja guna mendukung tingkat pemahaman SDM dan meningkatkan kelayakan investasi proyek KPBU. sedangkan, kinerja lainnya yang didukung oleh faktor penghargaan dan inovasi pengembangan sistem dan strategi pembiayaan infrastruktur bidang PUPR yang digunakan sebagai acuan (*benchmarking*) K/L/Pemda lain, saat ini belum teraplikasi dan masih memerlukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Rincian kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara pelatihan dan program kompetensi sertifikasi KPBU APMG *International Certified Public-Private Partnerships Professional (CP³P) Foundation level, Preparation Level and Excecution level* gelombang I, II dan III melalui program *Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services Project loan Asian Development Bank*. Pelaksanaan Pelatihan dan program kompetensi ini diselenggarakan secara daring (*online*) dan peserta pelatihan berasal seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.
2. Penyelenggara pengembangan kapasitas SDM pelatihan *financial modelling* untuk KPBU bidang Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, dan Perumahan melalui program *Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services Project loan Asian Development Bank*. Pelaksanaan ini diselenggarakan secara *hybird* (daring dan luring) dan peserta pelatihan merupakan perwakilan dari lima unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
3. Pengembangan alat pemantauan dan evaluasi kinerja (*ex-post*) menggunakan analisis *Input Output* untuk mengukur dampak dari penyelenggaraan program/kegiatan pembiayaan kreatif pada proyek strategis/prioritas/rintisan bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
4. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan diberikan mandat khusus oleh Menteri PUPR sebagai Ketua Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Satuan Tugas Pelaksanaan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

5. Mendukung percepatan penyiapan KPBU IKN sektor PUPR hingga terbitnya *Letter to Proceed* (LtP) dari Menteri PUPR kepada Badan Usaha.
6. Berperan aktif dalam penyiapan rancangan Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui KPBU di IKN dan rancangan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU IKN.



4.8. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

4.8.1. Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Dalam rangka menjaga kualitas kinerja dan menindaklanjuti penilaian atas hasil evaluasi SAKIP Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2021, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan secara konsisten melakukan pembahasan dan evaluasi internal melalui berbagai kegiatan untuk menilai faktor utama yang mendukung dan menghambat peningkatan akuntabilitas kinerja di tahun berikutnya.

Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2021 sebesar 79,24% dengan predikat BB (sangat baik). Implementasi SAKIP pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 78,08% (peningkatan sebesar 1,16%). Berdasarkan hasil evaluasi di atas, diketahui terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja tahun 2022, antara lain:

Tabel 4. 8 Nilai Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021

No	Komponen	Bobot/Nilai Maksimum (%)	Nilai Hasil Evaluasi (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	24,99
2	Pengukuran Kinerja	25	20,13
3	Pelaporan Kinerja	15	13,08
4	Evaluasi Internal	10	6,79
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja	20	14,24
Jumlah		100	79,24

Sumber: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, 2022

1. Perencanaan Kinerja

- Perlu memastikan dokumen perencanaan lainnya (selain Renstra) menyajikan indikator kinerja yang jelas.
- Perlu menyusun SOP revidi dokumen perencanaan.
- Hasil evaluasi perlu menjadi masukan/pertimbangan dalam menyusun dokumen perencanaan di tahun selanjutnya.

Tindak Lanjut:

- Pada dokumen perencanaan kinerja selain Renstra, yakni Renja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) telah menyesuaikan yang dimaksud.

- b. SOP revidir dokumen perencanaan sudah ada di tahun 2019. Pada 2022, dilakukan penyesuaian karena perubahan kelembagaan unit organisasi, serta pemutakhiran alur proses berlandaskan tugas dan fungsi.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Perlu percepatan penyelesaian penyusunan SKP dengan model *cascading* kinerja organisasi hingga ke tingkat individu (staf) yang menggambarkan keterkaitan tugas, target dan capaian pimpinan dan staf.
- b. Menyusun usulan mekanisme *reward* dan *punishment* berdasarkan indikator kinerja, selain mekanisme berdasarkan kehadiran yang selama ini berlaku, dan mendorong untuk diusulkan hingga ketingkat kementerian.
- c. Penilaian kinerja secara berkala (laporan bulanan) agar termasuk di dalamnya evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja/Rencana Aksi, selain evaluasi terhadap realisasi anggaran.

Tindak Lanjut:

- a. Telah dilakukan *cascading* kinerja organisasi hingga ke tingkat individu (staf) yang menggambarkan keterkaitan tugas, target dan capaian pimpinan dan staf.
- b. Inovasi mekanisme *reward* dan *punishment* belum terdapat di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi karena perlu mengacu pada peraturan atau kebijakan dari Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR.
- c. Pada dokumen pelaporan kinerja bulanan sudah sesuai dengan yang dimaksud.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Perlu menyajikan penjelasan lengkap mengenai penyebab penurunan capaian kinerja berdasarkan perbandingan tahun sebelumnya pada laporan kinerja.
- b. Perlu menyajikan penjelasan pada laporan kinerja mengenai efisiensi yang dilaksanakan dalam penggunaan anggaran.

Tindak Lanjut:

- a. Pada Bab 4 (Akuntabilitas Kinerja) telah dijelaskan analisis perbandingan kinerja dan penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja.
- b. Pada Bab 4 (Akuntabilitas Kinerja) telah dijelaskan analisis efisiensi anggaran dan analisis efektivitas dan efisiensi kinerja.

4. Evaluasi Internal

- a. Dalam penyusunan laporan kinerja agar dilengkapi dengan penjelasan mengenai upaya yang dilakukan yang mendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan capaian kinerja, serta rencana upaya peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya.
- b. Perlu menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara menyeluruh dalam perencanaan, penerapan manajemen kinerja, dan pengukuran keberhasilan unit kerja melalui langkah nyata sehingga kegiatan yang mendukung program menjadi lebih baik dan konkret.

Tindak Lanjut:

- a. Pada Bab 4 (Akuntabilitas Kinerja) telah dijelaskan analisis keberhasilan dan kegagalan kinerja, serta strategi peningkatan kinerja di tahun 2023.
- b. *Output* penetapan kegiatan yang berbasis penerapan manajemen kinerja dan pengukuran keberhasilan kinerja tercantum pada Bab 3 (Kapasitas Organisasi) dan Bab 4 (Akuntabilitas Kinerja).

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja

- a. Perlu dilakukan penjelasan secara menyeluruh terhadap peningkatan capaian kinerja pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.
- b. Perlu menumbuhkan motivasi seluruh karyawan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi, sehingga mendapatkan pengakuan dan penghargaan.

Tindak Lanjut:

- a. Analisis perbandingan capaian kinerja pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya terdapat pada Bab 4 (Akuntabilitas Kinerja).
- b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta mulai dibudayakannya dialog kinerja merupakan komitmen menumbuhkan motivasi pegawai untuk kreatif dan inovatif.

4.8.2. Evaluasi Paruh Waktu Renstra

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan berperan terhadap koordinasi pelaksanaan evaluasi paruh waktu (EPW) Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan RPJMN 2020-2024. Hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada kontrak kinerja 2022, yakni melalui paket kegiatan Penyusunan Reviu Renstra 2020-2024. Dasar hukum pelaksanaan EPW diantaranya tercantum di dalam Permen PUPR

Nomor 23 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020-2024.

Kontribusi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah memberikan masukan terhadap draf EPW Renstra Kementerian PUPR TA 2020-2024 dan tambahan usulan kerangka regulasi Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024. (terlampir). Sejalan dengan hal tersebut, Tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk melakukan penilaian terhadap capaian target (target capaian kinerja, target pelaksanaan kegiatan, target pengalokasian anggaran, serta realisasi kerangka regulasi dan kelembagaan) pada tahun berjalan relatif terhadap perencanaan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian PUPR 2020-2024.

Kegunaan dari penyusunan EPW adalah untuk menyusun rekomendasi penyesuaian kebijakan dan langkah strategis yang perlu dilakukan pada sisa waktu perencanaan (tahun 2023-2024) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun berjalan (2022), serta adanya perubahan kebijakan pembangunan dalam skala nasional, perkembangan kondisi terkini termasuk berbagai penyesuaian yang dilakukan sebagai akibat pandemi Covid-19. Saat ini, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan sedang menyiapkan draf EPW Renstra Kementerian PUPR TA. 2020-2022, dan selanjutnya akan disampaikan kepada BPIW Kementerian PUPR. Metode EPW Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024 dijelaskan sebagai berikut:

a. *Ex-Ante Evaluation* (Evaluasi pada tahap perencanaan)

Memilih alternatif kebijakan terbaik dari berbagai alternatif yang ada dan memastikan dokumen perencanaan disusun secara terstruktur, koheren dan sistematis, menggunakan *Rapid Assessment* (sinkronisasi antar dokumen) dan *Logical Framework Analysis*.

b. *On-Going Evaluation* (Evaluasi pada tahap pelaksanaan)

Menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, menggunakan Evaluasi Proses Pelaksanaan, *Gap Analysis* dan *Earn Value Analysis*.

c. *Ex-post Evaluation* (Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan)

Melihat progres pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan secara efisien, efektif, berkemanfaatan, dan berkelanjutan, menggunakan *Importance Performance Analysis* dan Evaluasi Komprehensif (efisiensi, efektivitas dan kemanfaatan program besar).

Pada 2023, EPW diharapkan mendukung kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, antara lain:

- a. Fokus Penyiapan dan Transaksi KPBU yang *Financial Close* Tahun 2024, untuk mengejar kesenjangan (*gap*) target proyek KPBU sampai dengan TA 2024.
- b. Percepatan *ready to offer* Proyek KPBU, dengan penggabungan dokumen penyiapan, yaitu Studi Pendahuluan dan *outline bussiness case* (OBC), menjadi OBC+.
- c. Penyiapan Proyek KPBU melalui Badan Penyiapan Dukungan terhadap pembiayaan infastruktur PUPR di IKN melalui skema KPBU.
- d. Dukungan ekosistem pembiayaan perumahan melalui perluasan skema pembiayaan perumahan.
- e. Dukungan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan melalui Badan Pelaksana Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF).
- f. Pengembangan aturan pelaksanaan dalam mendorong operasional skema-skema KPR Tapera maupun produk-produk PT SMF.

4.8.3. Penyusunan Rencana Kerja

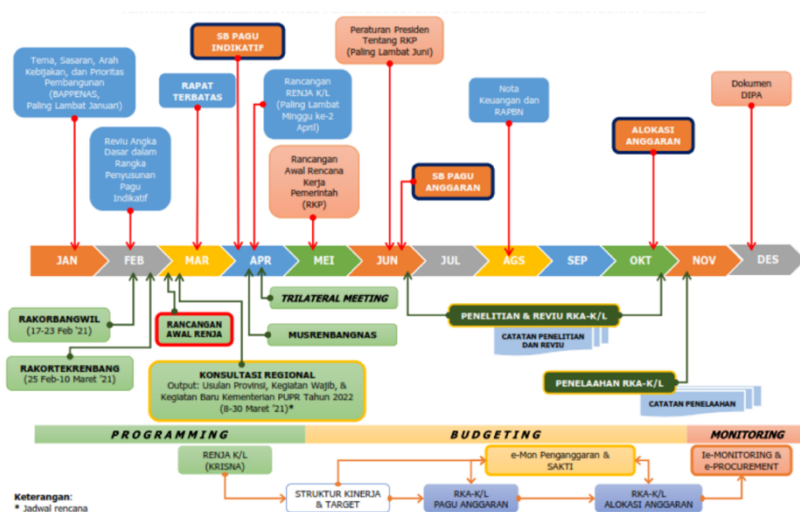
Perencanaan yang terintegrasi, bersinergi, dan terkoneksi dengan baik mampu mewujudkan visi yang telah dicita-citakan. Hal tersebut berlaku bagi suatu K/L. Untuk menjawab dan mengatasi permasalahan tersebut, setiap K/L perlu adanya perencanaan dan sistem penganggaran yang terintegrasi, bersinergi dan terkoneksi. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menyusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam tahapannya, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) disiapkan oleh Menteri sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka RPJMN. Dalam rancangan

awal ini disusun rancangan pagu indikatif dalam kegiatan *multilateral meeting*, *bilateral meeting*, dan *trilateral meeting*. Hasil dari kesepakatan tersebut adalah Surat Edaran Bersama (SEB) pagu indikatif yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala PPN/Bappenas. Selanjutnya SEB tersebut menjadi pedoman sebagai penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL). Setelah tersusunnya Renja-KL, dilakukan penelaahan oleh Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran untuk menetapkan Pagu Anggaran.

Dengan ditetapkan Pagu Anggaran, dilakukan penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) berdampingan dengan penyusunan TOR/RAB sebagai dokumen pendukung dalam penyusunan RKA-K/L. Didalam PMK 136 tahun 2017 tentang Penyusunan RKA-K/L, dijelaskan bahwa dalam rangka penguatan berbasis kinerja maka dilakukan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang merupakan integrasi antara dua Kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, sehingga dokumen KRISNA juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RKA-K/L. Dengan tersusunnya RKA-K/L menjadi acuan sebagai dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melakukan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Direktorat TA. 2023. *Output* berupa Renja dan RKA-K/L merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian PUPR beserta Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020-2024. Berikut merupakan gambaran rangkaian progres pemrograman dan anggaran.



Gambar 4. 1 Proses Pemrograman dan Penganggaran

Proses Pemograman dan Penganggaran terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

- a. *Programming*: Rakorbangwil, Rakortekrenbang, Konsultasi Regional, Musrenbangnas dan Penyusunan Pagu Indikatif.
- b. *Budgeting*: Trilateral Meeting, Penyusunan Pagu Anggaran, Aplikasi SAKTI, Penelitian dan Reviu RKA-K/L, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
- c. *Monitoring*: Penelahan dan Reviu RKA-K/L, Penetapan Alokasi Anggaran dan Dokumen DIPA.



4.8.4. Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko

Dalam rangka memberikan kontribusi pada tata kelola dan perbaikan manajemen risiko organisasi, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan secara periodik melakukan penguatan terhadap perkembangan sistematika penerapan manajemen risiko terintegrasi. Efektivitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menciptakan dan melindungi nilai-nilai di dalam organisasi dengan mengelola risiko, mengambil keputusan, menetapkan dan mencapai sasaran, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mengingat pentingnya peran manajemen risiko tersebut, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan berkomitmen untuk menyelenggarakan manajemen risiko secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Maka dari itu, diperlukan penyusunan Laporan Penerapan Manajemen Risiko di tingkat Unit Kerja (UPR T-2) untuk mengetahui efektivitas respon risiko dan memberikan umpan balik atas kendala pelaksanaan (hambatan) respon risiko.

Penerapan manajemen risiko mengacu pada Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian PUPR. Selain itu, penyelenggaraan manajemen risiko berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR. Dalam Surat Edaran tersebut tercantum proses manajemen risiko yang terdiri atas: (a) Komunikasi dan konsultasi; (b) Perumusan lingkup, konteks dan kriteria; (c) Penilaian risiko; (d) Respon risiko; (e) Pemantauan dan tinjauan; dan (f) Pencatatan dan pelaporan.

Hasil capaian penerapan manajemen risiko Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 adalah sebesar 78,52%. Nilai ini diukur berdasarkan tingkat keikutsertaan pegawai dan pimpinan di unit kerja dalam rangka menciptakan budaya risiko (25%), tingkat kesesuaian dan kelengkapan profil risiko sesuai dengan aturan berlaku (21%), tingkat keikutsertaan dalam kegiatan yang diadakan dalam rangka manajemen risiko (16,67%), dan tingkat efektivitas pengendalian risiko (15,86%).

Rincian penilaian atas penerapan manajemen risiko, matriks pemantauan inovasi pengendalian dan level risiko pada tingkat UPR T-2 Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 memuat kompleksitas implemementasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban pencapaian tujuan terhadap PK yang telah disusun pada awal tahun. Proses integrasi di dalam SAKIP telah mengacu pada (1) Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2) Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta (3) Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Pada 2022, pelaksanaan evaluasi AKIP merujuk Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, pencapaian kinerja tahun 2022 Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melebihi dari yang direncanakan dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, meskipun beberapa hal masih perlu mendapat perhatian. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan akan terus berupaya menjalankan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja melalui pencapaian kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Untuk mendukung hal tersebut, pada tahun 2023 akan dilakukan penyempurnaan atas *cascading* kinerja, kebijakan dan strategi agar dapat lebih menggambarkan peran serta kegiatan yang dilakukan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sebagai unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Untuk mendukung upaya perbaikan internal dan peningkatan akuntabilitas kinerja, seluruh kegiatan diselenggarakan mengusung konsep *money follow program* dan dialog kinerja. Upaya tersebut kemudian diselaraskan dalam perencanaan strategis, manajemen keuangan, manajemen kinerja, manajemen risiko dan manajemen organisasi dan SDM. Pada 2022, terdapat inovasi dalam hal kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, antara lain insiasi kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Turki, Abu Dhabi, Hungaria,



Finlandia, dan Belanda. Pada 2023 diharapkan keberlanjutan inovasi dan akselerasi program/kegiatan berdampak positif bagi kemajuan unit kerja dan organisasi.

Laporan Kinerja yang disusun diharapkan berguna sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan bukti pertanggungjawaban yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja dan capaian 2022 dalam melaksanakan tugas. Tugas tersebut adalah penyiapan perumusan dan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja yang akan berdampak positif dalam meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas pembiayaan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2022 mampu mencapai kinerja sebesar **105,25%**. Hal demikian didasarkan pada persentase atas realisasi indikator kinerja yang melebihi target yang tertera pada Renstra Direktorat TA 2020-2024. Berdasarkan capaian realisasi anggaran tahun 2022, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan berhasil meraih angka sebesar **96,37%** dari target 100%.



5.1. Permasalahan

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan teridentifikasi beberapa kendala yang dihadapi untuk memenuhi target kinerja, yaitu:

1. Adanya kebijakan *refocussing* anggaran yang dilakukan beberapa kali menyebabkan proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat.
2. Belum optimalnya pengembangan *dashboard input output* dalam menyukseskan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk mengukur dampak ekonomi dari adanya investasi pembiayaan kreatif pada proyek infrastruktur bidang PUPR.
3. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi proyek infrastruktur melalui *dashboard* Simpul KPBU bidang PUPR.
4. Belum adanya Surat Edaran tentang penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
5. Belum maksimalnya pengintegrasian dan pembaharuan *big data* pada HREIS.
6. Proses verifikasi dan validasi dokumen Asosisasi Pengembang Perumahan dan Badan Usaha Pengembang Perumahan pada aplikasi SIRENG masih dilakukan secara manual.
7. Belum ditetapkannya regulasi tentang Rencana Umum proyek KPBU bidang PUPR periode 2022-2024.
8. Belum adanya pedoman pengelolaan manajemen risiko proyek infrastruktur KPBU PUPR.

5.2. Rekomendasi

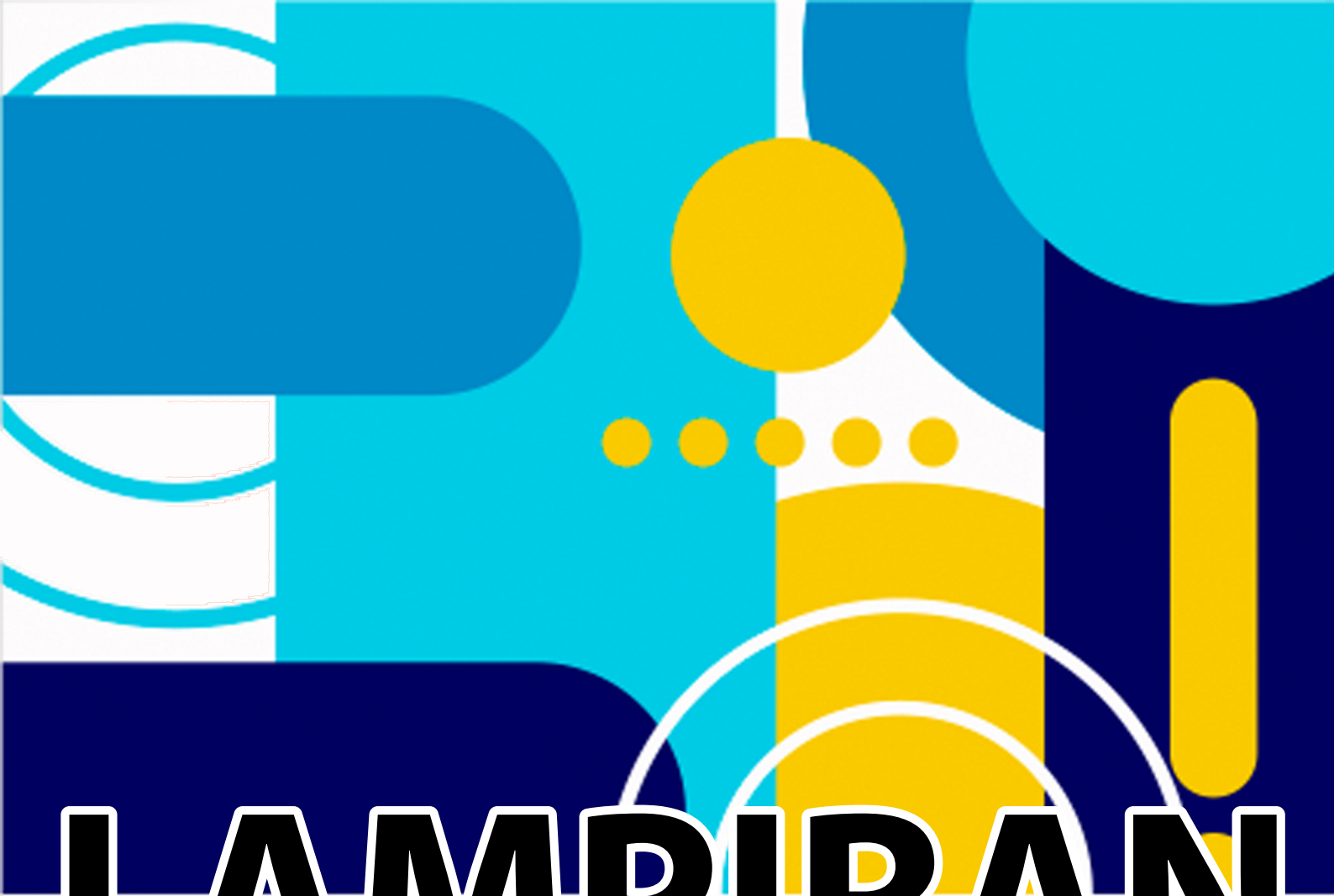
Dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan perlu melakukan langkah-langkah berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan mengacu pada rencana aksi dan optimalisasi penerapan *money follow program*.
2. Penguatan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam pengisian progres proyek infrastruktur melalui *dashboard* Simpul KPBU bidang PUPR.
3. Pengembangan *dashboard* Simpul KPBU dengan penambahan fitur data *real time* dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk proyek KPBU Jalan Tol, dan

penghitungan dampak *multiplier* (analisis *input output*) proyek KPBU bidang PUPR.

4. Legalisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
5. Pembaharuan data yang sudah tersedia di laman (*website*) HREIS, terdiri dari data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS), data Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data realisasi subsidi bantuan perumahan, dan beberapa data pendukung lainnya.
6. Meningkatkan koordinasi antara K/L perihal akuisisi data perumahan.
7. *Transfer knowledge* pengelolaan data HREIS kepada Tim Pengelola laman (*website*) HREIS.
8. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data dengan K/L lainnya mengenai verifikasi dan validasi dokumen Asosisasi Pengembang Perumahan dan Badan Usaha Pengembang Perumahan pada aplikasi SIRENG.
9. Legalisasi Rencana Umum proyek KPBU bidang PUPR periode 2022-2024.
10. Penyusunan pedoman pengelolaan manajemen risiko proyek infrastruktur KPBU PUPR.





LAMPIRAN

PEN

LAMPIRAN

DATA PEGAWAI

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Umur
1.	Agus Sulaeman, S.T., M.M.	196808271997031002	Pembina Utama Muda/IV-c	L	S-2	Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	54
2.	Fina Sjafinas, S.T, M.Si	196611221994032002	Pembina Tingkat I/IV-b	P	S-2	Kasubdit Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	56
3.	Andri Yusandra, S.T., M.U.M.	196811051997031001	Pembina Tingkat I/IV-b	L	S-2	Kasubdit Kepatuhan Intern	54
4.	Bambang Triatmoko, S.E, M.Si	196311071990031003	Pembina Tingkat I/IV-b	L	S-2	Analisis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Perencanaan, Pengelolaan Data dan Informasi	59
5.	Ary Rahman Wahyudi, S.T., MURB&RegPlg	198405132009121001	Penata Tingkat I/III-d	L	S-2	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi	38
6.	Ade Suryadi, S.E., M.Si.	197105172002121001	Penata Tingkat I/III-d	L	S-2	Kasubag Tata Usaha	51
7.	Tantra Rifai, S.T.	198602222009121003	Penata Tingkat I/III-d	L	S-1	Analisis Anggaran Ahli Muda/SKBT Kebijakan Pembiayaan	36
8.	Denik Haryani, S.T., M.Sc	198601152009122001	Penata/III-c	P	S-2	Analisis Anggaran Ahli Muda/SKBT Strategi Pembiayaan	36
9.	Satriadi Utomo, S.Kom	198105202009121001	Penata Tingkat I/III-d	L	S-1	Pranata Komputer Ahli Muda/SKBT Pengembangan Sistem Informasi	41

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Umur
10.	Ervin Supriyanto, S.T.	198302072009011004	Penata Tingkat I/III-d	L	S-1	Statistisi Ahli Muda/SKBT Pengelolaan Data Pembiayaan	39
11.	Moammar Alzia Viqolbi, S.T., MT.	198906162018021001	Penata/III-c	L	S-2	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda/SKBT Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	33
12.	Arum Prihati Musyarofa, S.H., M.A	197310222005022001	Penata Tingkat I/III-d	P	S-2	Analisis Kebijakan Ahli Muda/SKBT Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	52
13.	Adi Femiliandri, S.Si.	197705032005011008	Penata Tingkat I/III-d	L	S-1	Analisis Kebijakan Ahli Muda/SKBT Pemantauan dan Evaluasi Kinerja I	45
14.	Rina Nur Utami, S.T.	198203112009012002	Penata Tingkat I/III-d	P	S-1	Analisis Kebijakan Ahli Muda/SKBT Pemantauan dan Evaluasi Kinerja II	40
Staf Subdit Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur							
15.	Sabrina Sabila, S.T., M.T.	198806152010012006	Penata/III-c	P	S-2	Analisis Kerjasama	34
16.	Muhammad Yodi Rizkyardi, S.E., M.B.A.	198911012020121002	Penata Muda Tk. I/III-b	L	S-2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	33
17.	Linda Dwi Roswitasari, S.E., M.M.	199009292020122003	Penata Muda Tk. I/III-b	P	S-2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	32
18.	Muhammad Nur Hidayat, S.E., M.B.A.	199109062020121006	Penata Muda Tk. I/III-b	L	S-2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	31

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Umur
19.	Raissa Rahmaditya Rabilla, S.E., M.M.	199209132020122005	Penata Muda Tk. I/III-b	P	S-2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	30
20.	Farisah Arum Rosyana, SST., M.M.	198908242020122003	Penata Muda Tk. I/III-b	P	S-2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	33
21.	Fahmil Ridho Ilahi, S.E.	199104242019031007	Penata Muda/III-a	L	S-1	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	31
22.	Dwi Putri Heritasari, S.T.	199402192019032013	Penata Muda/III-a	P	S-1	Perencana Ahli Pertama	28
23.	Novi Riandini, S.Kom.	199311072018022002	Penata Muda/III-a	P	S-1	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	29
24.	Nadya Indah Yulita, S.T.	198907012019032007	Penata Muda/III-a	P	S-1	Pranata Komputer Ahli Pertama	33
25.	Gusti Ayu Prathita Ananta, S.Kom.	199410252019032010	Penata Muda/III-a	P	S-1	Pranata Komputer Ahli Pertama	28
Staf Subdit Manajemen Risiko							
26	Chisillia Mayangsari, S.E., M.E.	199305052020122005	Penata Muda Tk. I/III-b	P	S-2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	29
27.	Javier Almer Davinsi, S.E., M.M.	199011052020121002	Penata Muda Tk. I/III-b	L	S-2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	32
28.	Melyana Gita Astika, S.E., M.E.	199205262020122004	Penata Muda Tk. I/III-b	P	S-2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	30
29.	Sandy Sugama, M.B.A.	198911212020121003	Penata Muda Tk. I/III-b	L	S-2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	33
30.	Rini Wulansari, S.E., M.M.	199401062020122004	Penata Muda Tk. I/III-b	P	S-2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	28

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Umur
31.	Deka Bayu Dirgantara, S.Tr.M	199602052019031007	Penata Muda/III-a	L	S-1	Analisis Kebijakan Pertama	26
Pegawai Honorer							
32.	Daphne Hariyati R, S.E.	H22061981092018001	--	P	S-1	Analisis Pembiayaan	41
33.	Feby Kharisma Darmasakti, S.AP.	H10021984092018001	--	L	S-1	Penelaah Tata Naskah Dinas	38
34.	Fujiah Hasanatur Rohmah, S.Pd.	H18021994092018001	--	P	S-1	Penelaah Tata Naskah Dinas	28
35.	Dina Fitriana, S.E.	E21021996062018001	--	P	S-1	Penelaah Kerjasama	26
36.	Ardiyansyah, S.Kom.	H18121989092018001	--	L	S-1	Penelaah Keuangan	32
37.	Putery Eno Lestari	H27041997092018001	--	P	SMA	Pengadministrasian Umum	25
38.	M. Novel	H24081987092018001	--	L	SMA	Pramubakti	35
39.	Taufik Ismail	H28101974092018001	--	L	SMP	Pramubakti	48
40.	Mardi Prayogi	H28041982092018001	--	L	SMA	Pengemudi	40
Pegawai Tenaga Pendukung Individual (TPI)							
41.	Ria Risma Ardiani, S.T.	--	--	P	S-1	Staf Subdit Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	29
42.	Andri Dirgantara, S.T, M.T, M.Sc	--	--	L	S-2		50
43.	Evi Triarini, S.T.	--	--	P	S-1		26
44.	Amira Dhiandini, S.T.	--	--	P	S-1		28

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Umur
45.	Afiyah Dhiya Nasywa, S.T.	--	--	P	S-1		23
46.	Dwika Alam Indrajati, S.T.	--	--	L	S-1		22
47.	Benny Subekti, S.Kom.	--	--	L	S-1		31
48.	Benni Prihantoro, S.Sos., M.Si	--	--	L	S-2		34
49.	Ilham Surachman, S.I.Kom.	--	--	L	S-1		23
50.	Sinthia Mahesa Tari, S.Ak.	--	--	P	S-1	Staf Subdit Manajemen Risiko	23
51.	Irsyad Al Azhar, S.T.	--	--	L	S-1		22
52.	Diaz Laksamana Muttaqien, S.T.	--	--	L	S-1		22
53.	Raden Ajeng Alya Aulia Maharani, S.Si.	--	--	P	S-1		23
54.	Angga Maesa Danu, S.T, M.T	--	--	L	S-2		28
55.	Tri Mulyadi, S.E.	--	--	L	S-1		31
56.	Widya Astuti, S.T., M.T.	--	--	P	S-2		27
57.	Adam Ramadhan, S.H.	--	--	L	S-1		29
58.	Panji Kurniawan, S.T.	--	--	L	S-1		31
59.	Rifka Nur Annisa	--	--	P	S-1		23
60.	Chadijah Ayu M	--	--	P	S-1		22

LAMPIRAN

DAFTAR KEGIATAN PENGEMBANGAN SDM

No	Kegiatan		Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara	Jumlah Pegawai	Nama Pegawai yang Melaksanakan
1.	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Public-Private Partnerships Professional (CP3P) – Execution Level</i>		10-21 Januari 2022	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	5 orang	1. Moammar Alzia Viqolbi 2. Novi Riandini 3. Javier Almer Davinsi 4. Chisillia Mayangsari 5. Raissa Rahmaditya Rabilla
2.	Pelatihan Bidang Manajemen Umum Quartal I Tahun 2022	Pelatihan Perencanaan Anggaran	14 – 23 Februari 2022	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	3 orang	1. Moammar Alzia Viqolbi 2. Fahmil Ridho Illahi 3. Dwi Putri Heritasari
		Pelaksanaan Anggaran	21 – 30 Maret 2022		3 orang	1. Sabrina Sabila 2. Muhammad Yodi Rizkyardi 3. Farisah Arum Rosyana
3.	Pelatihan Bidang Permukiman Tahun 2022	Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	7 Maret – 28 April 2022	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman	1 orang	Moammar Alzia Viqolbi
		Pengembangan Permukiman Perkotaan	8 – 24 Maret 2022		4 orang	1. Rina Nur Utami 2. Javier Almer Davinsi 3. Chisillia Mayangsari 4. Muhammad Nur Hidayat
		Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	6 – 16 Juni 2022		3 orang	1. Tantra Rifai 2. Moammar Alzia Viqolbi 3. Rina Nur Utami
4.	Pelatihan Bidang Konstruksi Bulan Mei s.d Juni 2022	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1	11 Mei – 3 Juni 2022	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	2 orang	1. Sabrina Sabila 2. Moammar Alzia Viqolbi

No	Kegiatan		Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara	Jumlah Pegawai	Nama Pegawai yang Melaksanakan
		Penyelenggaraan Proyek Infrastruktur PUPR dengan Metodologi <i>Building Information Modelling</i>	27 Juni – 2 Juli 2022		2 orang	1. Ary Rahman Wahyudi 2. Moammar Alzia Viqolbi
5.	Pelatihan <i>Financial Modelling</i> Proyek KPBU Bidang PUPR		27 Juni – 8 Juli 2022	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	13 orang	1. Denik Haryani 2. Moammar Alzia Viqolbi 3. Aisyah Visi Murpratiwi 4. Chadijah Ayu Mawarni 5. Deka Bayu Dirgantara 6. Fahmil Ridho Ilahi 7. Feby Kharisma 8. Muhammad Yodi Rizkyardi 9. Novi Riandini 10. Panji kurniawan 11. RA Alya Aulia Maharani 12. Ria Risma 13. Sinthia Mahesa Tari
6.	Pelatihan Teknologi Informasi (<i>Web Development</i>)		28 Juni – 12 Juli 2022	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	2 orang	1. Nadya Indah Yulita 2. Gusti Ayu Prathita
7.	Pelatihan Bidang Konstruksi Juli s.d Agustus 2022	Hukum Kontrak Kerja Konstruksi	22 – 31 Agustus 2022	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	2 orang	1. Bambang Triatmoko 2. Ervin Supriyanto
		Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	4 – 8 Juli 2022		2 orang	1. Melyana Gita Astika 2. Farisah Arum Rosyana
		Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1	4 – 21 Juli 2022		2 orang	1. Fahmil Ridho Ilahi 2. Dwi Putri Heritasari
8.	Pelatihan Bidang	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	11 - 19 Juli 2022		1 orang	Ade Suryadi

No	Kegiatan		Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara	Jumlah Pegawai	Nama Pegawai yang Melaksanakan
	Manajemen Umum Semester II Tahun 2022	Tata Persuratan dan Kearsipan	22 - 26 Agustus 2022	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	1 orang	Dina Fitriana
		Manajemen Pengembangan SDM	10 -14 Oktober 2022		1 orang	Ardiyansyah
9.	Pelatihan Asesor Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi		26 - 30 September	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2 Orang	1. Melyana Gita Astika 2. Rini Wulansari
10.	Pelatihan Bidang Konstruksi September s.d. Oktober 2022	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Level 1	3-14 Oktober 2022 & 17 - 20 Oktober 2022	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	3 orang	1. Farisah Arum Rosyana 2. Chisillia Mayangsari 3. Deka Bayu Dirgantara
11.	Pelatihan Pembiayaan Perumahan		28 September - 7 Oktober 2022	Pusbangkom Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	2 Orang	1. Javier Almer Davinsi 2. Linda Dwi Roswitasari
12.	Webinar on Quantifying Emissions (GHGs and SLCPs) from the Urban Infrastructures (Transport, Water, Wastewater and Waste Management)		7-8 Desember 2022	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	13 Orang	1. Denik Haryani 2. Dwi Putri Heritasari 3. Muhammad Nur Hidayat 4. Raissa Rahmaditya Rabilla 5. Farisah Arum Rosyana 6. Linda Dwi Roswitasari 7. Evi Triarini 8. Dwika Alam Indrajati 9. Yodi Rizkyardi 10. Afiyah Dhiya Nasywa 11. Chisillia Mayangsari 12. Moammar Alzia Viqolbi 13. Amira Dhiandini

LAMPIRAN

SASARAN KEGIATAN

Sasaran Program/SasaranKegiatan		Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Penghitungan	Sumber Data
Program Dukungan Manajemen						
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator: 1. Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang Siap Dikerjasamakan (%)	IKSP2, dihitung pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) 1. Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem,Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,dibandingkan dengan target. Indikator 2 (70%) 2. Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan Pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan)		Internal dan Eksternal

Sasaran Program/SasaranKegiatan		Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Penghitungan	Sumber Data
Program Dukungan Manajemen						
SK	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan)	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Komposit dari Indikator- Indikator sebagai berikut: 1. Tingkat Implementasi Kegiatan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU Dan Perumahan (%) 2. Tingkat Implementasi Kegiatan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko Dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan (%) 3. Tingkat Implementasi Kegiatan Penyelenggaraan SAKIP (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (40%) 1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang Dikeluarkan Dibandingkan dengan Target (20%) 2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) 3. Jumlah Fasilitas Kerjasama Pembiayaan Perumahan yang Dilaksanakan Dibandingkan dengan Target (20%)		

Sasaran Program/SasaranKegiatan		Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Penghitungan	Sumber Data
Program Dukungan Manajemen						
				Indikator 2 (30%) 1. Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) Indikator 3 (30%) Penilaian dari Kementerian PAN dan RB		

LAMPIRAN

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 2: Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				%	100	100	100	100	100	100	40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																
1.	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			%	100	100	100	100	100	100	40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
KOORDINATOR: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan																
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan										40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063	
	OUTPUT KEGIATAN :															
1.	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan			Rekomendasi Kebijakan	3	2	0	0	0	3	16,316	10,877	-	-	-	27,193
	1.	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	4,500	2,625	-	-	-	7,125
	2.	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar dan Kriteria Bidang Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	1	5,004	2,700	-	-	-	7,704
	3.	Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	6,812	5,553	-	-	-	12,365
2.	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			Rekomendasi Kebijakan	6	5	6	6	6	29	4,317	21,734	6,000	6,000	6,000	44,051
	1.	Jumlah Draft Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	4	2	2	2	2	12	3,203	1,600	2,500	2,500	2,500	12,303
	2.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1,114	19,357	1,500	1,500	1,500	24,971
	3.	Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Dana dan Pola Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	0	0	1	1	1	3	-	-	1,000	1,000	1,000	3,000
	4.	Jumlah Dokumen Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	4	-	777	1,000	1,000	1,000	3,777
3.	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			Rekomendasi Kebijakan	5	6	6	6	6	29	3,871	5,000	6,000	6,000	6,000	26,871
	1.	Jumlah Profil Risiko Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	4	20	2,531	3,400	4,000	4,000	4,000	17,931
	2.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	4	-	750	1,000	1,000	1,000	3,750

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3.	Jumlah Dokumen Fasilitas dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,340	850	1,000	1,000	1,000	5,190	
4.	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		NSPK	2	0	1	1	1	5	1,575	-	2,000	2,000	2,000	7,575	
	1.	Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK	2	0	1	1	1	5	1,575	-	2,000	2,000	2,000	7,575	
5.	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan		Kegiatan	1	1	1	0	0	1	7,144	6,610	1,102	-	-	14,856	
	1.	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	0	0	1	7,144	6,610	1,102	-	-	14,856	
6.	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Laporan	0	3	3	3	3	12	-	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	
	1.	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	
	2.	Jumlah Laporan Layanan dan konsultasi Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	
	3.	Jumlah Laporan Pengendalian dan pemantauan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	
7.	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Layanan	4	4	4	4	4	20	3,127	2,000	3,000	3,000	3,000	14,127	
	1.	Jumlah Dokumen pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	2	2	2	2	9	949	1,000	1,000	1,000	1,000	4,949	
	2.	Jumlah Dokumen pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	2	1	1	1	1	6	1,622	500	1,000	1,000	1,000	5,122	
	3.	Jumlah Dokumen pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	1	1	1	1	5	556	500	1,000	1,000	1,000	4,056	
8.	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Laporan	7	3	3	3	3	19	3,890	2,000	2,500	2,500	2,500	13,390	
	1.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	3	1	1	1	1	7	1,866	900	1,000	1,000	1,000	5,766	

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2.	Jumlah Laporan dan Informasi pimpinan di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	6	1,274	700	1,000	1,000	1,000	4,974
	3.	Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	6	750	400	500	500	500	2,650

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Agus Sulaeman**

Jabatan : Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

AGUS SULAEMAN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum dan Perumahan	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	100%

KEGIATAN

Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

ANGGARAN

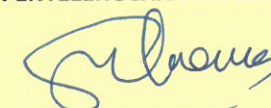
Rp31.800.827.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2022

**DIREKTUR JENDERAL
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN**


HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI
 PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**


AGUS SULAEMAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Agus Sulaeman**

Jabatan : Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2022

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

AGUS SULAEMAN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum dan Perumahan	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	100%

KEGIATAN

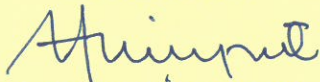
Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

ANGGARAN

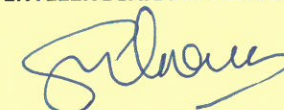
Rp31.663.700.000,00

JAKARTA, NOVEMBER 2022

**DIREKTUR JENDERAL
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN**


HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI
 PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**


AGUS SULAEMAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Agus Sulaeman**

Jabatan : Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

AGUS SULAEMAN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum dan Perumahan	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	100%

KEGIATAN

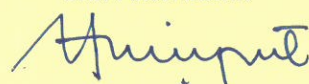
Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

ANGGARAN

Rp31.263.700.000,00

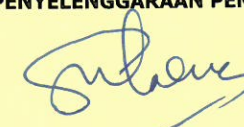
JAKARTA, DESEMBER 2022

**DIREKTUR JENDERAL
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI
 PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**



AGUS SULAEMAN

LAMPIRAN

RENCANA KERJA

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								330.000,0
	054 - Pelaksanaan Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan								000 - Bukan Tematik		2.400.000,0
	051 - Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										2.000.000,0
		Pusat	Pusat								2.000.000,0
	052 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Pelaksanaan Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										400.000,0
		Pusat	Pusat								400.000,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										2.500.000,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi								000 - Bukan Tematik		2.500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										2.500.000,0
		Pusat	Pusat								2.500.000,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										2.600.000,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								000 - Bukan Tematik		1.100.000,0
	051 - Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										1.100.000,0
		Pusat	Pusat								1.100.000,0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal								000 - Bukan Tematik		1.500.000,0
	051 - Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										1.500.000,0
		Pusat	Pusat								1.500.000,0
Total											10.330.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				10.330.000,0				14.011.764,7	14.011.764,7	14.011.764,7
01.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		5.230.000,0				10.911.764,7	10.911.764,7	10.911.764,7
01.ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABF.001.051	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	0,0	Rekomendasi Kebijakan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABF.001.052	Penyusunan Standar dan Kriteria Bidang Pembiayaan Perumahan	0,0	Rekomendasi Kebijakan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABF.001.053	Pelaksanaan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	0,0	Rekomendasi Kebijakan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	5	Rekomendasi Kebijakan		2.830.000,0	5	5	5	4.911.764,7	4.911.764,7	4.911.764,7
01.ABF.002.051	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3,0	Rekomendasi Kebijakan	666.666,7	2.000.000,0	2,0	2,0	2,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
01.ABF.002.052	Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	500.000,0	500.000,0	2,0	2,0	2,0	1.411.764,7	1.411.764,7	1.411.764,7
01.ABF.002.052	Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	330.000,0	330.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABF.002.054	Pelaksanaan Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	0,0	Rekomendasi Kebijakan	NaN	0,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	5	Rekomendasi Kebijakan		2.400.000,0	6	6	6	6.000.000,0	6.000.000,0	6.000.000,0
01.ABF.003.051	Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4,0	Rekomendasi Kebijakan	500.000,0	2.000.000,0	4,0	4,0	4,0	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0
01.ABF.003.052	Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	0,0	Rekomendasi Kebijakan	NaN	0,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.ABF.003.053	Pelaksanaan Fasilitas dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	400.000,0	400.000,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen		2.500.000,0				1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan		2.500.000,0	1	1	1	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.EBA.963.051	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Layanan	2.500.000,0	2.500.000,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan		2.600.000,0				2.100.000,0	2.100.000,0	2.100.000,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen		1.100.000,0	3	3	3	1.100.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0
01.EBD.953.051	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3,0	Dokumen	366.666,7	1.100.000,0	3,0	3,0	3,0	1.100.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal	3	Dokumen		1.500.000,0	3	3	3	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.EBD.965.051	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3,0	Dokumen	500.000,0	1.500.000,0	3,0	3,0	3,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
Total					10.330.000,0	-	-	-	14.011.764,7	14.011.764,7	14.011.764,7

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

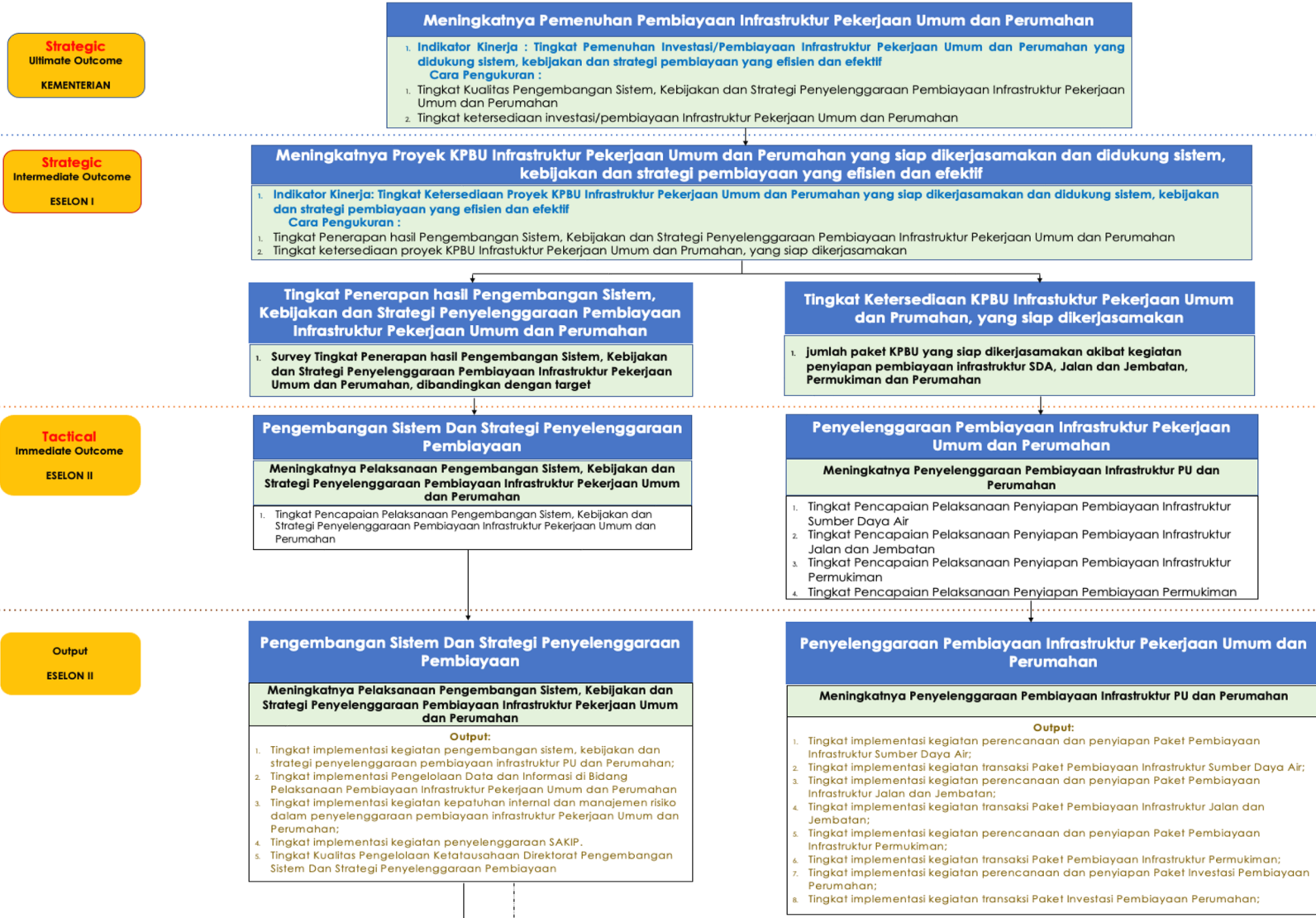
KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.ABF.003.053	Pelaksanaan Fasilitas dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0
01.EBA.963.051	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Utama	2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.600.000,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100.000,0
01.EBD.953.051	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Utama	1.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100.000,0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
01.EBD.965.051	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Utama	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
Total			10.000.000,0	0,0	0,0	330.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.330.000,0

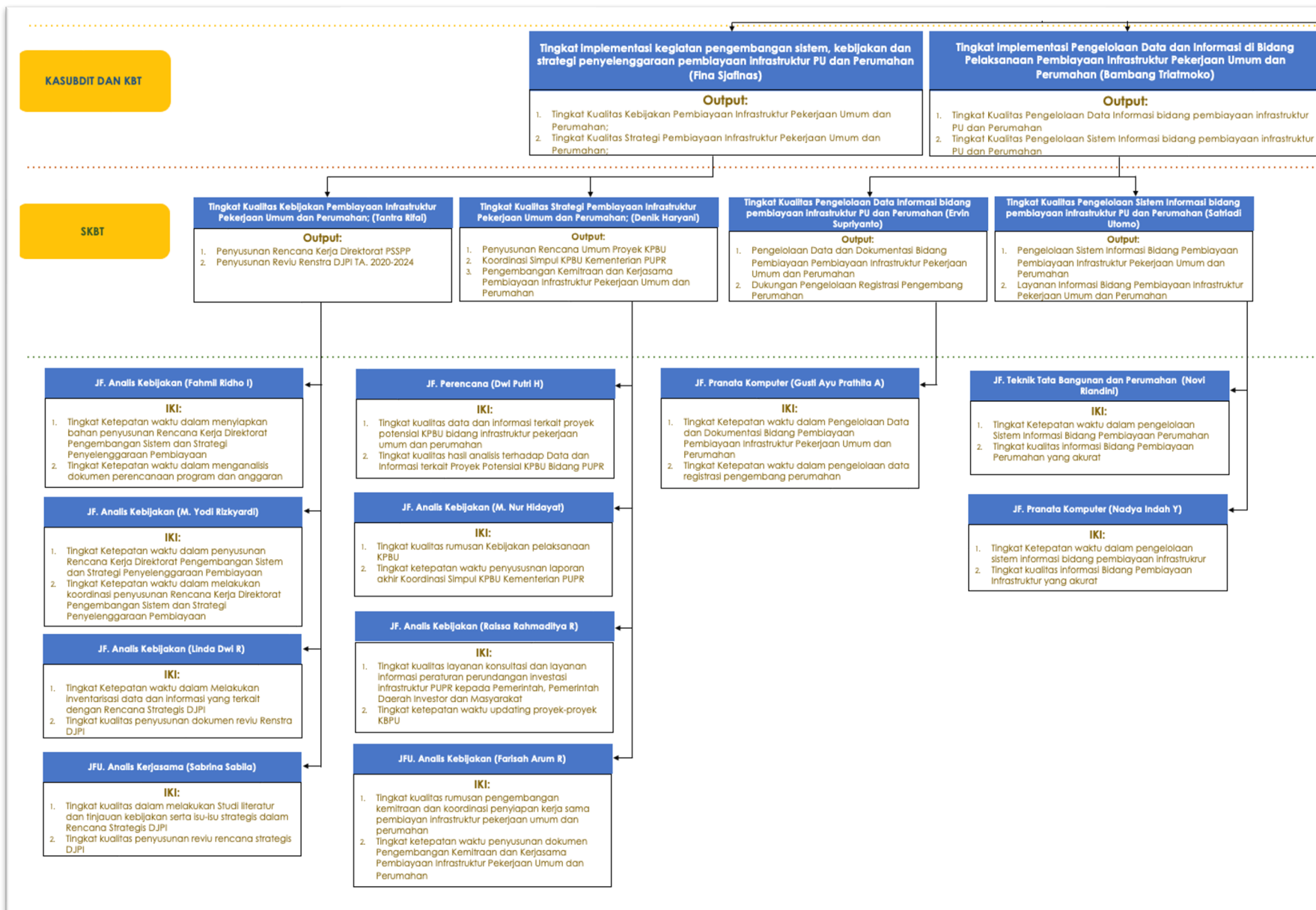
Jakarta, 18 Januari 2023

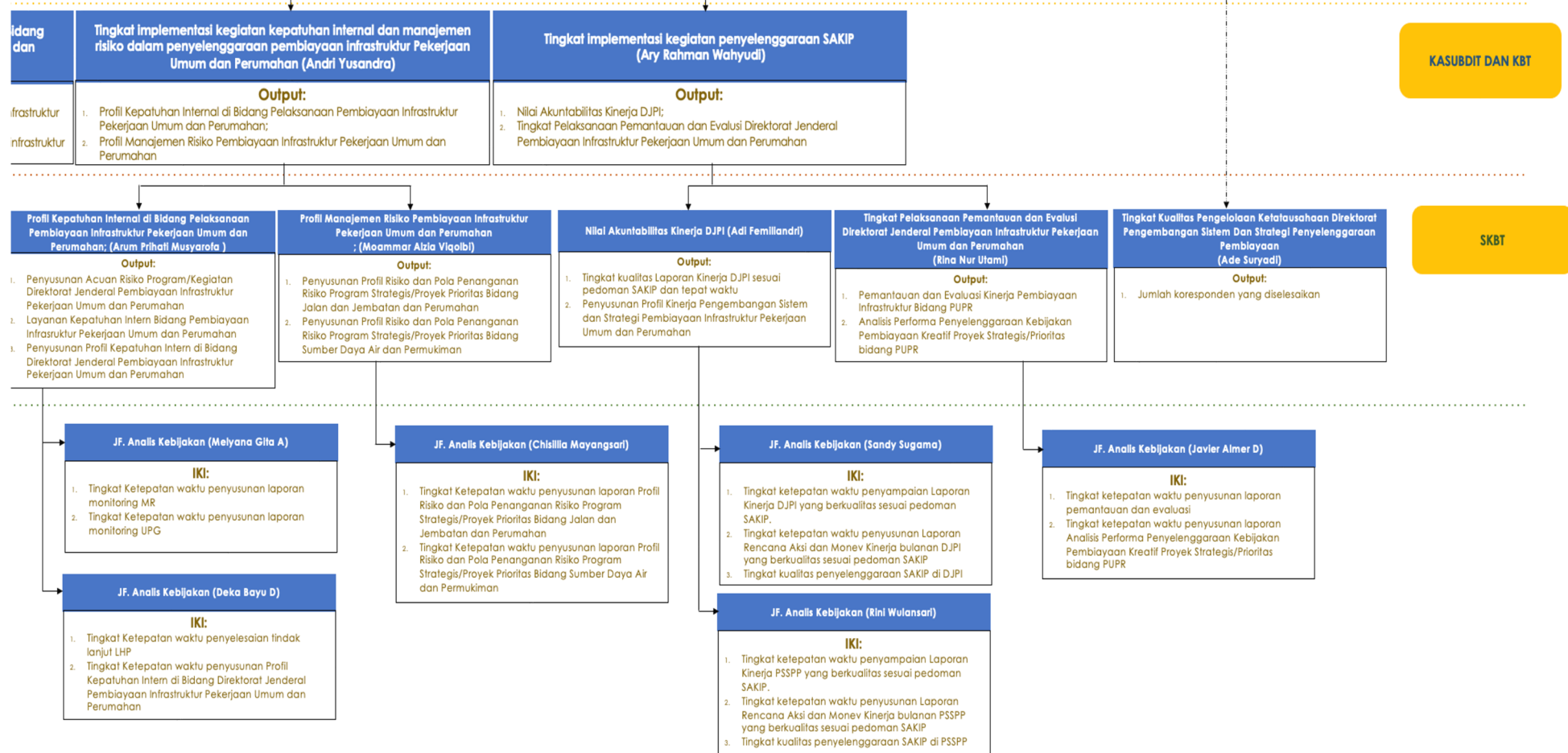
LAMPIRAN

POHON KINERJA

POHON KINERJA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN







LAMPIRAN

METODE PENGUKURAN

Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Indikator Kontributor	Sub Komponen Perhitungan	Target DIPA	Target Renstra	Capaian DIPA	Capaian Renstra	DIPA (%)	Renstra (%)	Total DIPA	Total Renstra	DIPA	RENSTRA	Total Capaian DIPA	Total Capaian Renstra
Kegiatan: 4195 Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan															
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Indikator 1 (40%) Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)	Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%)	Grand Design Housing dan Real Estate Information System (HREIS)	1	0	1	1	100%	200%	20%	40%	100%	120%	40%	48%
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%)	Penyusunan Rencana Kerja Direktorat PSSPP TA. 2023	6	6	6	6	100%	100%	20%	20%				
			Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBu TA. 2023												
			Penyusunan Reviu Renstra DJPI TA. 2020-2024												
			Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 Di Lingkungan DIrektorat PSSPP												
			Koordinasi Simpul KPBu Kementerian PUPR TA. 2022												

			PMC Firm to Support DGIF for Public Works and Housing with Implementation of The Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services Project (ESP)													
			Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan													
		Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%)	-	0	1	0	0	0%	0%	20%	20%					
		Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%)	-	0	1	0	0	0%	0%	20%	20%					
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Bidang Pembiayaan IPUP Tahun 2022	1	4	1	4	100%	100%	20%	20%					

		Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%)	Dukungan Pengelolaan Registrasi Pengembang Perumahan Tahun 2022													
			Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan IPUP Tahun 2022													
			Layanan Informasi Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022													
	Indikator 2 (30%) Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)	Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%)	Penyusunan Acuan Risiko Program/Kegiatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3	3	3	3	100%	100%	50%	50%	100%	83,33%	30%	25%	
			Layanan Kepatuhan Intern Bidang Pembiayaan Infrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan													
			Penyusunan Profil Kepatuhan Intern di Bidang Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan													

		Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (50%)	Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan Risiko Program Strategis/Proyek Prioritas Bidang Jalan dan Jembatan dan Perumahan	4	6	4	4	100%	66,67%	50%	33,33%				
			Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan Risiko Program Strategis/Proyek Prioritas Bidang Sumber Daya Air dan Permukiman												
			Analisis Performa Penyelenggaraan Kebijakan Pembiayaan Kreatif Proyek Strategis/Prioritas Sektor Sumber Daya Air dan/atau Jalan dan Jembatan												
			Analisis Performa Penyelenggaraan Kebijakan Pembiayaan Kreatif Proyek Strategis/Prioritas Sektor Perumahan dan/atau Permukiman												

[illegible]

Kode	Paket Kegiatan	Vol	Satuan	Pagu (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Realisasi (%)	
						Keuangan	Fisik
4195	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			30.069.995	28.977.085	96,37	97,51
KRO	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	11	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	25.779.034	24.843.617	96,37	97,63
RO	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1.632.190	1.377.720	84,41	100
Komponen	<i>Grand Design Housing dan Real Estate Information System (HREIS)</i>	1	Rekomendasi	1.632.190	1.377.720	84,41	100
RO	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	6	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	21.748.055	21.100.314	97,02	97,33
Komponen	Penyusunan Rencana Kerja Direktorat PSSPP TA. 2023	1	Rekomendasi	395.000	391.827	99,20	100
Komponen	Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBK TA. 2023	1	Rekomendasi	496.000	494.957	99,79	100
Komponen	Penyusunan Reviu Renstra DJPI TA. 2020-2024	1	Rekomendasi	496.140	494.401	99,65	100
Komponen	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 DI lingkungan Direktorat PSSPP	1	Laporan	305.250	305.070	99,94	100
Komponen	Koordinasi Simpul KPBK Kementerian PUPR TA. 2022	1	Rekomendasi	492.028	486.365	98,85	99
Komponen	<i>PMC Firm to Support DGIF for Public Works and Housing with Implementation of The Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services Project (ESP)</i>	1	Rekomendasi	19.168.637	18.534.100	96,69	97

Komponen	Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Rekomendasi	395.000	393.594	99,64	100
RO	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	2.398.789	2.365.583	98,62	98,75
Komponen	Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan Risiko Program Strategis/Proyek Prioritas Bidang Jalan dan Jembatan dan Perumahan	1	Rekomendasi	599.510	586.616	97,85	98
Komponen	Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan Risiko Program Strategis/Proyek Prioritas Bidang Sumber Daya Air dan Permukiman	1	Rekomendasi	599.640	580.091	96,74	97
Komponen	Analisis Performa Penyelenggaraan Kebijakan Pembiayaan Kreatif Proyek Strategis/Prioritas Sektor Sumber Daya Air dan/atau Jalan dan Jembatan	1	Rekomendasi	599.986	599.720	99,96	100
Komponen	Analisis Performa Penyelenggaraan Kebijakan Pembiayaan Kreatif Proyek Strategis/Prioritas Sektor Perumahan dan/atau Permukiman	1	Rekomendasi	599.653	599.156	99,92	100
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan/Laporan/Dokumen	2.442.040	2.352.474	96,33	96,82
RO	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan/Laporan/Dokumen	2.442.040	2.352.474	96,33	96,82
Komponen	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Bidang Pembiayaan IPUP Tahun 2022	1	Layanan	698.790	685.854	98,15	99
Komponen	Dukungan Pengelolaan Registrasi Pengembang Perumahan Tahun 2022	1	Layanan	498.200	486.473	97,65	98
Komponen	Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan IPUP Tahun 2022	1	Layanan	697.650	667.231	95,64	96
Komponen	Layanan Informasi Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022	1	Layanan	547.400	512.916	93,7	94

KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6	Dokumen/Layanan/Laporan	1.848.921	1.780.995	96,33	96,7
RO	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen/Layanan/Laporan	699.951	697.207	99,61	100
Komponen	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Bidang PUPR	1	Dokumen	399.993	399.921	99,98	100
Komponen	Penyusunan Profil Kinerja Pengembangan Sistem dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Dokumen	299.958	297.287	99,11	100
RO	Layanan Audit Internal	3	Dokumen/Layanan/Laporan	1.148.970	1.083.788	94,33	94,7
Komponen	Penyusunan Acuan Risiko Program/Kegiatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Dokumen	349.560	327.951	93,82	94
Komponen	Layanan Kepatuhan Intern Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Dokumen	399.670	380.515	95,21	96
Komponen	Penyusunan Profil Kepatuhan Intern di Bidang Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Dokumen	399.740	375.321	93,89	94

Kode	Paket Kegiatan	2020			2021			2022		
		Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Persentase (%)	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Persentase (%)	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Persentase (%)
4195	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	46.619.170	38.795.443	83,22%	33.493.044	28.626.508	85,14%	31.263.700	30.170.530	96,50%
KRO	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	13.211.883	11.636.742	88,08%	23.902.188	20.586.885	86,13%	25.779.034	24.843.617	96,37%
RO	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	5.536.848	4.487.891	81%	11.627.128	10.686.495	91,91%	1.632.190	1.377.720	84,41%
RO	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.453.339	4.263.525	96%	10.555.197	8.182.829	77,52%	21.748.055	21.100.314	97,02%
RO	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.221.696	2.885.326	90%	1.719.863	1.717.561	99,87%	2.398.789	2.365.583	98,62%
KRO	Koordinasi	7.114.865	4.696.463	66%	5.165.492	3.618.839	70,06%	-	-	0%
RO	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan	7.114.865	4.696.463	66%	5.165.492	3.618.839	70,06%			0%
KRO	Layanan Data dan Informasi	11.456.983	9.660.726	84%	1.510.000	1.508.699	99,91%	2.442.040	2.352.474	96,33%

RO	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	11.456.983	9.660.726	84%	1.510.000	1.508.699	99,91%	2.442.040	2.352.474	96,33%
KRO	Layanan Pengawasan Internal	-	-	0%	1.211.543	1.209.821	99,86%	1.148.970	1.083.788	94,33%
RO	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	-	0%	1.211.543	1.209.821	99,86%	1.148.970	1.083.788	94,33%
KRO	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3.591.496	3.485.277	97%	953.821	953.765	100%	699.951	697.207	99,61%
RO	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.591.496	3.485.277	97%	953.821	953.765	100%	699.951	697.207	99,61%
KRO	Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.014.646	980.896	97%	-	-	0%	-	-	0%
RO	Koordinasi Simpul KPBU Kementerian PUPR TA. 2020	561.269	540.143	96%	-	-	0%	-	-	0%
RO	Identifikasi dan Seleksi Proyek Potensial KPBU Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2021	453.377	440.753	97%	-	-	0%	-	-	0%

KRO	Penyusunan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	9.229.297	7.361.385	80%	-	-	0%	-	-	0%
RO	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	725.722	688.703	95%	-	-	0%	-	-	0%
RO	Penyusunan Kriteria Proyek Strategi Nasional (PSN) Pembiayaan Infrastruktur PUPR	800.000	795.344	99%	-	-	0%	-	-	0%
RO	Penyusunan Standar dan Kriteria Bidang Pembiayaan Perumahan	7.703.575	5.877.338	76%	-	-	0%	-	-	0%
KRO	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.000.000	973.954	97%	750.000	748.499	99,80%	1.193.705	1.193.444	99,98%
RO	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	1.000.000	973.954	97%	750.000	748.499	99,80%	1.193.705	1.193.444	99,98%

LAMPIRAN

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
CAPAIAN KINERJA**



BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR : 01 / BA / Pk / 2023

**CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**

Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pengembangan Sistem dan Sistem Penyelenggaraan Pembiayaan telah disepakati Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2022 dengan hasil sebagai berikut:

**1. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Pembiayaan TA 2022**

No	Unit Sub Direktorat	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)	
				Keuangan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	25.822.285	24.830.508	92,59%	98,05%
2.	Sub Direktorat Kepatuhan Intern	4.247.710	4.146.578	97,52%	97,82%
3.	Sub Bagian Tata Usaha	1.193.705	1.193.444	99,98%	100%
TOTAL		31.263.700	30.170.530	96,70%	98,62%

**2. Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan
Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2022**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100	105,25%

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Sistem Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2022. Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan Terima kasih.

Jakarta, 18 Januari 2023

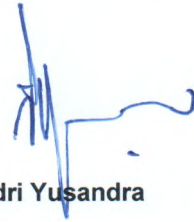
Yang Menyepakati,

Kepala Sub Direktorat Pengelolaan
Pembiayaan Infrastruktur



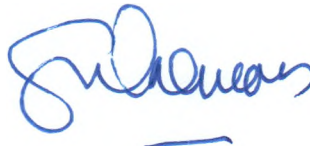
Fina Sjafinas

Kepala Sub Direktorat
Kepatuhan Intern



Andri Yusandra

Mengetahui,
Direktur



Agus Sulaeman

LAMPIRAN

**DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN**



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2022**

Revisi ke 08

Tanggal : 06 Desember 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : (16) | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : Rp. | 773.217.174.000 (TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA MILIAR DUA RATUS TUJUH BELAS JUTA SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 153.259.130.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 619.958.044.000 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 619.958.044.000 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 153.259.130.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 619.958.044.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|

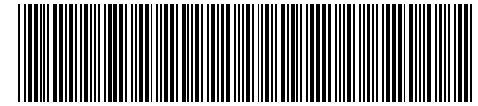
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022

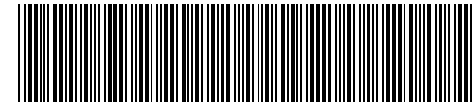


DS:0871-1583-1473-1759

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	208.484.308.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	208.484.308.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	564.732.866.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	564.732.866.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022

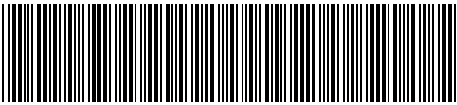


DS:0871-1583-1473-1759

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	564.732.866.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	564.732.866.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	208.484.308.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	74.031.280.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	30.069.995.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	104.383.033.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
I A. INFORMASI KINERJA



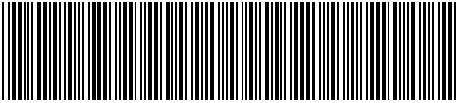
DS:0871-1583-1473-1759

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			564.732.866.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			564.732.866.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
	:	2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan	4.442.576.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5,00	Rekomendasi Kebijakan	4.442.576.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2,00	NSPK	1.380.526.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	2,00	NSPK	1.380.526.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,00	Dokumen	735.541.000
Rincian Output	:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2,00	Dokumen	735.541.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	1.745.638.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	1,00	kegiatan	1.745.638.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	9.458.585.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1,00	layanan	4.650.105.000
	:	02 QAH.002	Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1,00	layanan	4.808.480.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
I A. INFORMASI KINERJA



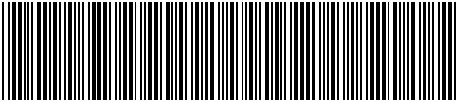
DS:0871-1583-1473-1759

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	13.672,00	Rumah Tangga	546.970.000.000
Rincian Output		:	01	QFC.001 Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	13672.00	Rumah Tangga	546.970.000.000
Program		:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			208.484.308.000
Kegiatan		:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			74.031.280.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
			7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
			8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan	66.724.471.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	658.273.000
			02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	888.070.000
			03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan	2.134.515.000
			04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	725.000.000
			05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	1.237.270.000
			06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	126.000.000
			07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	60.955.343.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0871-1583-1473-1759

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3,00	Unit	3.759.644.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2.00	Unit	3.016.665.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit	742.979.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang	580.000.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260.00	Orang	580.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Dokumen	2.967.165.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Dokumen	1.618.084.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.00	Dokumen	467.932.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2.00	Dokumen	881.149.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			30.069.995.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	11,00	Rekomendasi Kebijakan	25.779.034.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.632.190.000
		:	02	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	6.00	Rekomendasi Kebijakan	21.748.055.000
		:	03	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.398.789.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan	2.442.040.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	2.442.040.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
I A. INFORMASI KINERJA



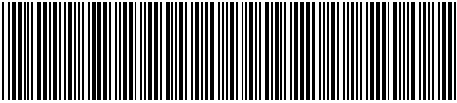
DS:0871-1583-1473-1759

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen	1.848.921.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	699.951.000
		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	3.00	Dokumen	1.148.970.000
Kegiatan		:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			104.383.033.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		:	2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		:	3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		:	4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	36,00	Rekomendasi Kebijakan	84.247.029.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.440.170.000
		:	02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	880.000.000
		:	03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	3.00	Rekomendasi Kebijakan	2.575.572.000
		:	04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	745.589.000
		:	05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.458.858.000
		:	06	ABF.006 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Rekomendasi Kebijakan	1.950.512.000
		:	07	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	11.00	Rekomendasi Kebijakan	57.887.199.000
		:	08	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.479.305.000
		:	09	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Rekomendasi Kebijakan	1.864.828.000
		:	10	ABF.010 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	663.810.000
		:	11	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.867.160.000
		:	12	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.267.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0871-1583-1473-1759

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan		
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.164.871.000
	14	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	6.455.213.000
	15	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.546.942.000
Klasifikasi Rincian Output	9	4197.AEE	Kemitraan	18,00	Kesepakatan	14.160.883.000
Rincian Output	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	5.00	Kesepakatan	1.897.142.000
	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	8.00	Kesepakatan	4.599.070.000
	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	3.00	Kesepakatan	3.173.810.000
	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	4.490.861.000
Klasifikasi Rincian Output	10	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3,00	NSPK	1.739.712.000
Rincian Output	01	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	948.255.000
	02	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	300.000.000
	03	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	491.457.000
Klasifikasi Rincian Output	11	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	20,00	Dokumen	4.235.409.000
Rincian Output	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	20.00	Dokumen	4.235.409.000

Jakarta, 17 November 2021
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 1966110211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022



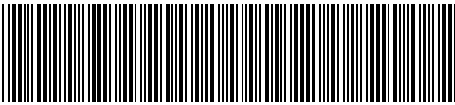
I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	773.217.174.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	4.887.388	Rp.	71.355.854.000
1. Rupiah Murni	Rp.	153.259.130.000		(2) RPLN	US\$	37.575.493	Rp.	548.602.190.000
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	619.958.044.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
(dalam ribuan rupiah)								

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT B	USD						
		3455-INO	USD	4.972,53	2	71.355.854			
		1F1NDHGA	IDR	71.355.854,00					
2	1	INTERNATIONAL BANK	USD						
		8717-ID	USD	38.230,12					
		1HG72SWA	IDR	548.602.190,00	3	548.602.190			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN



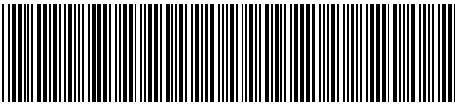
DS:0871-1583-1473-1759

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	34.205.420	735.252.110	3.759.644	-	-	773.217.174	01 . 54	
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	564.732.866	-	-	-	564.732.866		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	564.732.866	-	-	-	564.732.866		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.442.576	-	-	-	4.442.576		
01	RM	-	4.442.576	-	-	-	4.442.576		
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.380.526	-	-	-	1.380.526		
01	RM	-	1.380.526	-	-	-	1.380.526		
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	735.541	-	-	-	735.541		
01	RM	-	735.541	-	-	-	735.541		
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.745.638	-	-	-	1.745.638		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN



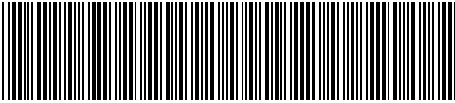
DS:0871-1583-1473-1759

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	1.745.638	-	-	-	1.745.638	139	RK 1HG72SWA
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	9.458.585	-	-	-	9.458.585	01 . 54	
01 RM		-	9.458.585	-	-	-	9.458.585	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	546.970.000	-	-	-	546.970.000	01 . 54	
02 PLN		-	546.970.000	-	-	-	546.970.000	140	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	34.205.420	170.519.244	3.759.644	-	-	208.484.308		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	34.205.420	36.066.216	3.759.644	-	-	74.031.280		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	34.205.420	32.519.051	-	-	-	66.724.471	01 . 54	
01 RM		34.205.420	32.519.051	-	-	-	66.724.471	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0871-1583-1473-1759

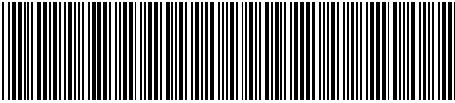
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	3.759.644	-	-	3.759.644	01 . 54	
01 RM		-	-	3.759.644	-	-	3.759.644	139	
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	580.000	-	-	-	580.000	01 . 54	
01 RM		-	580.000	-	-	-	580.000	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.967.165	-	-	-	2.967.165	01 . 54	
01 RM		-	2.967.165	-	-	-	2.967.165	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	30.069.995	-	-	-	30.069.995		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	25.779.034	-	-	-	25.779.034	01 . 54	
01 RM		-	4.978.207	-	-	-	4.978.207	139	
02 PLN		-	19.168.637	-	-	-	19.168.637	140	

PL 1F1NDHGA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN



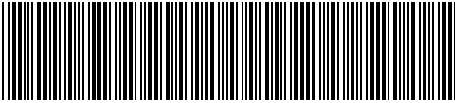
DS:0871-1583-1473-1759

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
02 PLN		-	1.632.190	-	-	-	1.632.190	140	RK 1HG72SWA
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.442.040	-	-	-	2.442.040	01 . 54	
01 RM		-	2.442.040	-	-	-	2.442.040	139	
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.848.921	-	-	-	1.848.921	01 . 54	PL 1F1NDHGA
01 RM		-	1.848.921	-	-	-	1.848.921	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	104.383.033	-	-	-	104.383.033		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	84.247.029	-	-	-	84.247.029	01 . 54	PL 1F1NDHGA
01 RM		-	32.059.812	-	-	-	32.059.812	139	
02 PLN		-	52.187.217	-	-	-	52.187.217	140	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	14.160.883	-	-	-	14.160.883	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0871-1583-1473-1759

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	14.160.883	-	-	-	14.160.883	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.739.712	-	-	-	1.739.712	01 . 54	
01 RM		-	1.739.712	-	-	-	1.739.712	139	
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.235.409	-	-	-	4.235.409	01 . 54	
01 RM		-	4.235.409	-	-	-	4.235.409	139	
JUMLAH		34.205.420	735.252.110	3.759.644	-	-	773.217.174		

Jakarta, 17 November 2021
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

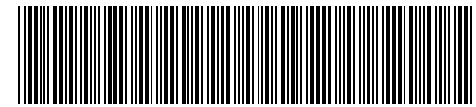
ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 1966110211996031001

Kementrian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0871-1583-1473-1759

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

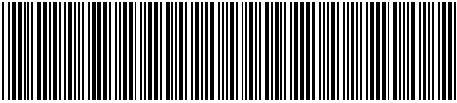
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	154.554	764.767	21.484.651	1.126.092	15.876.849	4.459.459	7.442.307	9.297.635	5.126.306	12.052.386	26.598.028	104.383.033

Jakarta, 17 November 2021
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 1966110211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
IV A. B L O K I R



DS:0871-1583-1473-1759

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

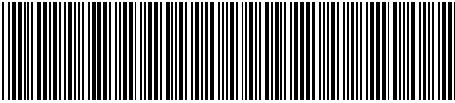
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 1966110211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022
IV B. C A T A T A N



DS:0871-1583-1473-1759

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 1966110211996031001

LAMPIRAN

MATRIKS PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN PADA TINGKAT UPR T-2

Matriks Pemantauan Inovasi Pengendalian pada Tingkat UPR T-2 Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
1	Kurang lengkapnya data dan informasi terkait kondisi eksisting lapangan pada proses identifikasi risiko	Mengurangi frekuensi dan dampak	1. Mengurangi kemungkinan : Melakukan koordinasi secara intensif dengan <i>stakeholder</i> terkait 2. Mengurangi dampak : Menyusun list kebutuhan data dan informasi	Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Intern	1. Dokumen berupa Notulensi hasil koordinasi 2. Checklist Data dan Informasi Pendukung	Triwulan III Tahun 2022	Koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan layanan dan konsultasi Kepatuhan Intern telah dilaksanakan sejak Triwulan I 2022	1. Telah dilaksanakannya kegiatan: a. Koordinasi tahap awal dengan Disperkim Bandung untuk membahas persiapan rencana Proyek Perencanaan Peremajaan Permukiman Kumuh dan Transformasi Hunian Rumah Tapak ke Vertikal Kota Bandung pada Januari 2022; b. Pembahasan terkait pengembangan skema pembiayaan hijau (blended finance) dan penerbitan obligasi pada 24 Maret 2022; c. Pembahasan terkait risiko lokasi dan desain untuk proyek persampahan berupah hibah KfW pada 13-14	-

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								April 2022. Saat ini progresnya adalah masih dilakukan kajian eligible proyek fasilitasi hibah oleh Tim PwC; d. Kunjungan lapangan ke prototipe perumahan terjangkau dan berwawasan lingkungan di Bandung pada 28 Juni 2022; e. Penyediaan sosialisasi dan pelatihan pengajuan BP2BT masih terhambat karena menunggu slot ketersediaan waktu dari Satker BP2BT (update Mei); f. Diajukan proposal kerjasama dengan PT SMI Terkait perhitungan emisi karbon pada proyek penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU pada 13 Juni 2022; g. Workshop	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								Pengenalan Manajemen Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tanggal 21-22 Juli 2022; h. Workshop Pengembangan Manajemen Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Lesson Learned Proyek KPBU SPAM tanggal 18 - 19 Agustus 2022; i. Workshop Pengembangan Pengelolaan Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Lesson Learned Proyek KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung tgl 15 - 16 Sept 2022; j. FGD Identifikasi Risiko Proyek KPBU Revitalisasi dan Modernisasi	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok tgl 10-12 Oktober 2022; k.Lesson Learned Penyusunan dan Implementasi Peraturan Menteri BUMN tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN 25 November 2022; l. Pembahasan Pilot Proyek Sektor Perumahan dengan Skema Green Financing 13 Desember 2022; m. Pembahasan Daftar Usulan Proyek Infrastruktur Bidang PUPR dengan Skema KPDBU do Kabupaten Solok Sumatera Barat 15 Desember 2022; dan n. Audiensi tentang Pembangunan RTG untuk MBR dan Skema Pembiayaan	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								dengan Daiwa Lease, Co.Ltd tgl 19 Desember 2022.	
2	Proses kegiatan layanan dan konsultasi Kepatuhan Intern tidak efektif secara keseluruhan	Mengurangi dampak	1. Menyusun SOP Layanan dan Konsultasi Kepatuhan Intern 2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan stakeholder terkait	Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Intern	1. SOP Layanan dan Konsultasi Kepatuhan Intern 2. Dokumen koordinasi formal (Undangan, Nota Dinas, Daftar Absen, dan Dokumentasi) dan koordinasi informal (Screenshoot whatsapp)	Triwulan IV Tahun 2022	Koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan layanan dan konsultasi Kepatuhan Intern telah dilaksanakan sejak Triwulan I 2022	1.Telah disusun Draft SOP Layanan dan Konsultasi Kepatuhan Intern. 2.Telah dilaksanakan kegiatan: a. Pengembangan Kapasitas Pemilik Risiko dalam Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan DJPI tanggal 2 Februari 2022 b. Workshop Pengelolaan Risiko atas Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan DJPI tanggal 31 Maret 2022 c. FGD Identifikasi Risiko Program/Kegiatan di Lingkungan	-

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								DJPI pada tanggal 07 April 2022; d. Sharing Session Anti Gratifikasi yang dilaksanakan pada Tanggal 31 Mei 2022; e. Konsolidasi Pemantauan MR UPR di Lingkungan DJPI setiap triwulan; f. Sosialisasi Survey Penilaian Integritas dan Internalisasi Budaya Anti Gratifikasi tanggal 10 Agustus 2022; g. Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dalam Pencapaian Sasaran Program DJPI tanggal 1 September 2022; h. Koordinasi Identifikasi Titik Rawan Pungutan Liar di Lingkungan DJPI tanggal 8 September 2022; i. FGD Identifikasi Risiko Fraud di Lingkungan DJPI tanggal 27 September 2022; j. Sharing	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								Knowledge Saber Pungli dan Penanganan Benturan Kepentingan tanggal 3 November 2022; k. Pembahasan Rencana Aksi Pengendalian Titik Rawan Pungli pada tanggal 7 November 2022; l. Pembahasan SOP Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Program/Kegiatan dan SOP Layanan Kepatuhan Intern DJPI tanggal 17 November 2022; m. Pembahasan Teknis Penilaian PIPK TA 2022 tanggal 13 Desember 2022; n. Pembahasan SOP Mikro Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko tanggal 14 Desember 2022; o. Pembahasan (Lanjutan) SOP Mikro Pelaksanaan	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								Penerapan Manajemen Risiko tanggal 15 Desember 2022; p. Pembahasan Kertas Kerja Penilaian PIPK TA 2022 tanggal 16 Desember 2022; q. Pembahasan SOP Makro Layanan Kepatuhan Intern pada tanggal 21 Desember 2022; dan r. Pembahasan SOP Mikro Layanan Kepatuhan Intern pada tanggal 23 Desember 2022.	
3	Dinamisasi perubahan <i>pipeline</i> proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan	Mengurangi frekuensi	1. Mengusulkan dokumen Rencana Umum Proyek KPBU di Kementerian PUPR 2. Membahas dengan Unit Eselon I Unit Organisasi lainnya/Tingkat Kementerian PUPR 3. Konsultasi dengan Menteri PUPR dan	Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	1. Konsep dokumen Rencana Umum Proyek KPBU di Kementerian PUPR 2. Notulensi pembahasan dan konsultasi	Triwulan IV Tahun 2022 (Finalisasi dokumen akan dilakukan Tahun 2024)	Koordinasi secara rutin dengan unit kerja teknis di DJPI dalam hal penyusunan proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan	1. Telah dilaksanakannya Trilateral Meeting KPBU antara Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam hal menyepakati Rencana Proyek KPBU Tahun 2023 pada tanggal 21 Februari 2022 dan dihadiri oleh	1. Perubahan bentuk legalisasi yang akan mengatur Rencana Umum Proyek KPBU bidang PUPR , yang awalnya ditetapkan melalui KepdirjenPI menjadi KepmenPUPR pada tanggal 8 Desember 2022

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
			Pimpinan Tinggi/Stakeholder lainnya (BAPPENAS, Kemenko-Ekon, Kemenko Marves, dan Kemenkeu) Melakukan Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan KPBU dengan Unit Eselon I di Unit Organisasi Kementerian PUPR serta konsultasi dengan Menteri PUPR dan Pimpinan Tinggi/Stakeholder lainnya (BAPPENAS, Kemenkeu, dan K/L lainnya) dalam rangka penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU di Kementerian PUPR					perwakilan Unit Organisasi terkait; 2. Telah dilaksanakannya rapat Reviu Renstra DJPI Kementerian PUPR dengan tiap Unit Kerja di DJPI dengan salah satu agendanya membahas Reviu Pipeline Proyek KPBU Tahun 2020-2024 pada tanggal 29 Maret 2022; 3. Telah dilaksanakan Konsinyasi Rencana Umum KPBU Bidang PUPR pada tanggal 9-10 Juni 2022; 4. Telah dilaksanakannya Reviu Renstra DJPI Kementerian PUPR dengan tiap unit kerja di DJPI dengan salah satu agendanya membahas Reviu Pipeline Proyek KPBU Tahun 2020-2024 pada tanggal 19 April	2. Perubahan formulasi isi/substansi dalam Rencana Umum Proyek KPBU bidang PUPR yang akan tercantum dalam SE Dirjen tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum KPBU di Lingkungan Kementerian PUPR 3. Terjadinya dinamisasi formulasi isi/substansi di dalam Draft Kepdirjen PI tentang Penetapan Daftar Rencana Umum Proyek KPBU PUPR sebanyak 2 kali

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								2022; 5. Telah dilaksanakannya Trilateral Meeting Program Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Tahun 2023 antara Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan dalam hal membahas alokasi pagu indikatif DJPI, salah satunya alokasi pagu mendukung rencana proyek KPBU Tahun 2023 pada tanggal 30 Mei 2022 dan dihadiri oleh perwakilan Unit Organisasi terkait; 6. Telah dilaksanakannya Trilateral Meeting Rekonfirmasi Daftar Rencana Proyek KPBU Kementerian PUPR dalam RKP Pagu Anggaran	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								Tahun 2023 antara Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam hal menyepakati Rencana Proyek KPBU Tahun 2023 pada tanggal 20 Juni 2022 dan dihadiri oleh perwakilan Unit Organisasi terkait; 7. Telah dilaksanakannya Trilateral Meeting Pagu Anggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 antara Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam hal menyepakati Rencana Proyek KPBU Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 12 Agustus 2022 dan dihadiri oleh	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								perwakilan Dirjen Cipta Karya, perwakilan Dirjen Perumahan, perwakilan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 8. Telah dilaksanakannya Rapat Pembahasan Konsep Awal Rencana Umum pada tanggal 15 Agustus 2022; 9. Telah dilaksanakannya Trilateral Meeting Pagu Anggaran Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2023 antara Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam hal menyepakati Rencana Proyek KPBU pada Sektor SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								Perumahan Tahun 2023 pada tanggal 23 Agustus 2022 dan dihadiri oleh perwakilan Unit Organisasi Teknis di Kementerian PUPR; 10. Telah dilaksanakannya Rapat Pembahasan Konsep Rencana Umum KPBU pada tanggal 15 September 2022; 11. Telah disusunnya Konsep Surat Edaran Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU di Lingkungan Kementerian PUPR; 12. Telah disusunnya Konsep Keputusan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan tentang Rencana Umum Proyek	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								KPBU di Lingkungan Kementerian PUPR sampai dengan Tahun 2024 dan Tahun 2025-2029; 13. Telah disampaikan Surat Permintaan Pemutakhiran Daftar Rencana Proyek KPBU Kementerian PUPR Tahun 2023 ke setiap Unit Kerja di lingkungan DJPI pada tanggal 29 September 2022; 14. Telah dilaksanakan konsinyasi Rencana Umum KPBU bidang PUPR pada tanggal 3-4 Oktober 2022 dengan Unit Kerja di DJPI, yang membahas lebih mendetail terkait kriteria dan mekanisme seleksi proyek KPBU dengan metode AMK, Daftar Rencana Umum	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								proyek KPBU s.d 2024, serta outline dokumen Rencana Umum KPBU. 15. Telah disampaikan Surat Direktur PSSPP ke Kepala BPAKLN hal Penyampaian Pemutakhiran Daftar Rencana Proyek KPBU Kementerian PUPR Tahun 2023 pada tanggal 3 Oktober 2022. 16. Telah disampaikan Surat Direktur PSSPP ke Kepala BPAKLN, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan hal Penyampaian Pemutakhiran Daftar Rencana Proyek KPBU TA 2023 pada tanggal 8 November 2022. 17. Telah dilakukan Pembahasan Konsep Kepdirjen PI tentang Rencana Umum	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								Proyek KPBU di Lingkungan Kementerian PUPR Tahun 2022-2024 dengan Unit Organisasi Teknis Kementerian PUPR pada tanggal 8 Desember 2022. 18. Telah terbitnya Lampiran I.d tentang Rincian Rencana Proyek Public Private Partnership (PPP) TA. 2023 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Pagu Alokasi Anggaran K/L TA 2023 Nomor S-821/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dan Surat Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan Nomor 14839/PP.01.04/Dt .8.5/T/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 hal Penyampaian Informasi Perubahan Daftar	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								Rencana Proyek KPBU TA 2023 Pasca Pagu Anggaran 2023.	
4	Tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan	Mengurangi frekuensi dan dampak	1. Mengurangi kemungkinan : Menetapkan SOP pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan verifikasi dan validasi data calon debitur/nasabah yang akan menerima kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan 2. Mengurangi dampak : Koordinasi Jarkomdat (Jaringan Komunikasi Data) dengan Pusdatin Kementerian PUPR sebagai wali data Kementerian dalam rangka terselenggaranya akses dukcapil	Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	1. Dokumen SOP data kependudukan dan kewajiban satker mengumpulkan data secara berkala 2. Nota dinas kegiatan koordinasi Jarkomdat dengan Pusdatin	1. Penetapan SOP November Tahun 2022 2. Koordinasi Jarkomdat Setiap bulan	Koordinasi jaringan komunikasi data dengan pusdatin secara rutin telah dilaksanakan sejak Triwulan I TA 2022	1. Telah disusun draft SOP Pemanfaatan Data Kependudukan dan dilaksanakan Rapat Pembahasan SOP Bidang Data dan Informasi Telah disusun draft SOP Pemanfaatan Data Kependudukan dan dilaksanakan Rapat Pembahasan SOP Bidang Data dan Informasi pada tanggal 20 Juli 2022 2. Telah dilaksanakan: a. Rapat Koordinasi dengan Pusdatin mengenai Pembahasan Juknis Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP -el pada	1. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan SOP Bidang Data dan Informasi pada tanggal 20 Juli 2022, perlu disusun tabel identifikasi SOP. Saat ini tabel identifikasi SOP bidang data dan informasi sedang dalam proses penyusunan. 2. Penetapan SOP Pemanfaatan Data Kependudukan memerlukan pembahasan dengan stakeholder terkait sebelum ditetapkan.

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								tanggal 17 Mei 2022 b. FGD Inventarisasi Kebutuhan Data Asosiasi & Badan Usaha Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Akreditasi Asosiasi dan Sertifikasi Pengembang Perumahan pada tanggal 26 Juli 2022; c. Rapat Koordinasi Perjanjian Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 31 Agustus 2022; d. Telah disusun Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2022 telah disampaikan kepada Dirjen Dukcapil pada 12 Agustus 2022; dan e. Telah disusun Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
								Semester 2 Tahun 2022.	
5	Hilangnya data sistem informasi DJPI yang tersimpan dalam server Pusdatin	Mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Melakukan backup data secara rutin 2. Melakukan migrasi server ke Pusat Data Nasional (PDN)	Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	Aplikasi Dashboard Simpul KPBU, API data penerima bantuan subsidi perumahan, dan SI BP2BT	Triwulan IV Tahun 2022	Koordinasi dengan Pusdatin terkait server telah dilaksanakan	Telah dilaksanakan: 1. Backup data Aplikasi Dashboard Simpul KPBU, API data penerima bantuan subsidi perumahan, dan SI BP2BT 2. Konsinyering Inventarisasi Sistem dan Struktur Data Sistem Informasi di Lingkungan DJPI pada tanggal 8 Desember 2022, di mana dilakukan pembahasan Pusdatin terkait migrasi server ke PDN	Pertemuan lanjutan dengan Pusdatin terkait rekonsiliasi untuk migrasi data ke PDN akan diagendakan di tahun 2023
6	Kurang lengkapnya data pendukung kegiatan penyusunan Laporan dan Informasi pimpinan di bidang Pelaksanaan Pembiayaan	Mengurangi frekuensi	Melengkapi fitur-fitur dalam sistem informasi	Koordinator/Ketua Tim Bidang Tugas Pemantauan Dan Evaluasi	Sistem informasi MIS	Triwulan IV Tahun 2022	Koordinasi dalam hal percepatan progres update data KPBU telah dilaksanakan	1. Secara rutin melaksanakan Pembahasan Data Isu Proyek, Data Progres dan Pemutakhiran Data Input pada	- Terjadi kerusakan dan tidak dapat digunakan kembali(system failure/ HDD hard brick/ bad sector)

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
	Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						sejak Triwulan I 2022	Aplikasi Pengelolaan Data KPBU Management Information System (MIS); 2. Progres hingga triwulan 1 adalah menyempurnakan fitur printing dan fitur <i>find data</i> pada manajemen isu; 3. Melakukan Koordinasi Pengisian Data Proyek pada Aplikasi Dashboard Simpul KPBU akibat <i>system crash</i> dan <i>lost data</i> di ruang server Pusdatin Kementerian PUPR; 4. Masing-masing unit kerja sudah melakukan updating progres proyek KPBU pada Sistem Informasi.	pada perangkat/server di PUSDATIN Kementerian PUPR

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan / Kendala
7	Kurang lengkapnya data dan informasi pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja DJPI dan Direktorat PSSPP	Mengurangi dampak	1. Pengumpulan bukti pendukung melalui platform penyimpanan data 2. Sosialisasi SOP	Koordinator/Ketua Tim Bidang Tugas Pemantauan Dan Evaluasi	1. Tersedianya platform penyimpanan data 2. Peningkatan kapasitas SDM terhadap SOP Lakip	Triwulan IV Tahun 2022	Koordinasi secara rutin untuk penyusunan laporan mingguan PSSPP	1. Telah dilaksanakan Sosialisasi SOP Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 2. Telah melaksanakan kegiatan: a. Evaluasi SAKIP DJPI dan PSSPP TA.2021; b. Secara rutin melakukan update data laporan mingguan PSSPP sampai Juni 2022 melalui platform <i>google doc</i>; c. Pembahasan tindak lanjut atas evaluasi SAKIP DJPI TA. 2021 pada bulan April 2022; dan d. Workshop Penyusunan Laporan Kinerja.	-

LAMPIRAN

MATRIKS PEMANTAUAN LEVEL RISIKO PADA TINGKAT UPR T-2

Matriks Pemantauan Level Risiko pada Tingkat UPR T-2 Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi
			Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kurang lengkapnya data dan informasi terkait kondisi eksisting lapangan pada proses identifikasi risiko	2 kejadian	1	2	3	2	2	7	4	Perlu melakukan pembahasan lebih lanjut terkait identifikasi Risiko Politik
2	Proses kegiatan layanan dan konsultasi Kepatuhan Intern tidak efektif secara keseluruhan	1 kejadian	2	3	10	1	3	5	5	-
3	Dinamisasi perubahan pipeline proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan	12 kejadian	2	2	7	5	2	15	8	1. Perlu menetapkan Daftar Rencana Umum Proyek KPBU PUPR hingga Tahun 2024 melalui Keputusan Menteri PUPR 2. Perlu mengusulkan perubahan substansi terkait Perencanaan Program Tingkat Kementerian 3. Perlu Pemutakhiran Lampiran Renstra DJPI Kementerian PUPR TA 2020-2024
4	Tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan	N/A	4	2	12	N/A	N/A	N/A	N/A	-
5	Hilangnya data sistem informasi DJPI yang tersimpan dalam server Pusdatin	1 kejadian	2	4	13	1	5	20	7	1. Management Information System (MIS) tidak digunakan kembali, diputuskan untuk kembali menggunakan Aplikasi Dashboard Simpul KPBU dengan alamat http://simpulkpbu.pu.go.id/dashboard/

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi
			Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko		
										2. Inovasi pengendalian berupa: a. Melakukan backup data secara rutin b. Melakukan migrasi server ke Pusat Data Nasional (PDN)
6	Kurang lengkapnya data pendukung kegiatan penyusunan Laporan dan Informasi pimpinan di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1 kejadian	2	4	13	1	5	20	7	Adanya system crash dan lost data di ruang server Pusdatin Kementerian PUPR yang berdampak pada hilangnya system code dan database beberapa Aplikasi DJPI diantara nya Management Information System (MIS), diputuskan untuk kembali menggunakan Aplikasi Dashboard Simpul KPBU dengan alamat http://simpulkpbu.pu.go.id/dashboard/
7	Kurang lengkapnya data dan informasi pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja DJPI dan Direktorat PSSPP	N/A	2	3	10	N/A	N/A	N/A	N/A	-

LAMPIRAN

HASIL PENILAIAN ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO



RISALAH
PEMBERIAN REWARD UNIT KERJA TERBAIK
ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
TA 2022

I. LATAR BELAKANG

Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerbitkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 dengan tujuan menyeragamkan penerapan Manajemen Risiko yang menciptakan dan melindungi nilai-nilai di dalam organisasi dengan mengelola risiko, mengambil keputusan, menetapkan dan mencapai sasaran, serta meningkatkan kinerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai hasil dari diterapkannya Manajemen Risiko, maka perlu diberikan *reward* kepada Unit Kerja terbaik atas pengelolaan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 24.1/KPTS/Dp/2021 tentang Pedoman Pemberian Reward and Punishment Lingkup Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

II. TUJUAN

Tujuan pemberian *reward* kepada Unit Kerja atas Penerapan Manajemen Risiko untuk membangun dan mengembangkan budaya risiko secara lebih komprehensif.

III. RUANG LINGKUP PENILAIAN PEMBERIAN REWARD

Ruang lingkup penilaian pemberian *reward* atas Penerapan Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Unit Pemilik Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan;
3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman; dan
6. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 24.1/KPTS/Dp/2021, penilaian pemberian *reward* dilakukan dengan membobotkan nilai pada 4 aspek sebagai berikut:

1. Keikutsertaan pegawai dan pimpinan di unit kerja dalam rangka menciptakan budaya risiko.
2. Kesesuaian dan kelengkapan Profil Risiko sesuai dengan aturan berlaku.
3. Keikutsertaan dalam kegiatan yang diadakan dalam rangka Manajemen Risiko.
4. Efektivitas Pengendalian Risiko.

Masing-masing aspek tersebut diberikan bobot sebesar 25% (maksimal), sehingga total bobot untuk 4 aspek tersebut sebesar 100%.

IV. BENTUK *REWARD*

Bentuk *reward* yang diberikan kepada Unit Kerja atas Penerapan Manajemen Risiko yaitu dalam bentuk piagam penghargaan dari Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

V. HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian atas pengelolaan Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Unit Pemilik Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terhadap 4 aspek tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Keikutsertaan pegawai dan pimpinan di unit kerja dalam rangka menciptakan budaya risiko
Setiap Unit Pemilik Risiko telah menciptakan budaya risiko dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. *Risk Governance* (Tatakelola / Governansi Risiko), mencakup kejelasan peran dan tanggung jawab pimpinan dalam pengelolaan risiko organisasi;
 - b. Kerangka kerja 'selera risiko', dimana adanya pernyataan selera risiko yang dipahami oleh pegawai di unit kerja dan secara konsisten dijadikan barometer dalam pengambilan keputusan. Organisasi sadar bila ada risiko baru yang muncul dan melebihi selera risiko, dan / atau menemukan adanya aktivitas di atas selera risiko yang sudah ditetapkan sehingga risiko tersebut dapat tereskalasi sesegera mungkin;
 - c. Adanya sistem pengendalian yang sepadan dengan skala dan kompleksitas organisasi.

Pada penerapan manajemen risiko Tahun Anggaran 2022, setiap Unit Pemilik Risiko dan beberapa perwakilan dari pegawainya telah menciptakan budaya risiko yang dimaksud, sehingga setiap Unit Kerja mendapatkan bobot 25%.

2. Kesesuaian dan kelengkapan Profil Risiko sesuai dengan aturan berlaku
Kesesuaian dan kelengkapan profil risiko ditinjau terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

No	Unit Pengelola Risiko	Ketepatan Pengumpulan Hasil Pemantauan			Kesesuaian Hasil Pengisian Form Pemantauan dengan SE 04 Tahun 2021			Pengumpulan Hasil Perbaikan Form Pemantauan MR		Ketepatan Rekomendasi yang ditindaklanjuti			Kesesuaian Hasil Perbaikan Pengisian Form Pemantauan dengan SE 04 Tahun 2021			Bobot (%)
		1	2	3	1	2	3	1 (Belum) (2%)	2 (Sudah) (5%)	1	2	3	1	2	3	
1	Setditjen			√			√		√			√			√	25
2	PSSPP		√				√		√		√				√	21
3	PPISDA		√			√			√		√				√	19
4	PPP			√			√		√		√				√	23
5	PPIP		√		√			√			√			√		13
6	PPIJJ		√		√				√		√			√		15

Keterangan

1: Belum Sesuai (1%)

2: Hampir Sesuai (3%)

3: Sesuai (5%)

3. Keikutsertaan dalam kegiatan yang diadakan dalam rangka Manajemen Risiko
Setiap Unit Pemilik Risiko telah mengikuti beberapa kegiatan dalam rangka Manajemen Risiko, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Setditjen		PSSPP		PPISDA		PPP		PPIP		PPIJJ	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	Pengembangan Kapasitas Pemilik Risiko dalam Menerapkan MR di Lingkungan DJPI	2 Februari 2022	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Workshop Pengelolaan Risiko atas Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan DJPI	31 Maret 2022		√		√		√		√	√	√		√
3	Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Risiko Program/Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2022	7 April 2022		√	√	√		√		√		√		√

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Setditjen		PSSPP		PPISDA		PPP		PPIP		PPIIJ	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
4	Konsolidasi Pemantauan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan pada Triwulan I TA. 2022	17 - 18 April 2022		√	√	√		√	√	√		√		√
5	Konsolidasi Pemantauan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan pada Triwulan II TA. 2022	14 - 15 Juli 2022		√		√		√	√	√	√	√		√
6	Konsolidasi Pemantauan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan pada Triwulan III TA. 2022	29 November 2022		√		√		√	√	√		√		√
7	Konsolidasi Pemantauan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan pada Triwulan IV TA. 2022	30 Januari 2023		√		√		√	√	√		√		√
8	Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dalam Pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	01 September 2022		√		√		√		√		√		√
9	Focus Group Discussion Identifikasi Risiko Fraud/Kecurangan di Lingkungan DJPI	27 - 28 September 2022		√		√		√		√		√		√
Total Bobot (%)			13,89		16,67		13,89		19,44		16,67		13,89	

Keterangan :

1: Kegiatan dihadiri oleh Pejabat Struktural (Bobot Penilaian 12,5 %)

2: Kegiatan dihadiri oleh Pegawai/Staf (Bobot Penilaian 12,5 %)

4. Efektivitas Pengendalian Risiko

Efektivitas Pengendalian Risiko ditinjau terhadap besaran risiko yang direspon dengan besaran risiko aktual yang terdapat pada Laporan Pemantauan atas Penerapan Manajemen Risiko serta kesesuaian substansi berdasarkan SE 04 Tahun 2021 . Apabila besaran risiko yang direspon sama dengan atau lebih besar dari besaran risiko aktual serta substansi telah sesuai dengan SE 04 Tahun 2021 maka

pengendalian dianggap efektif. Rekapitulasi Nilai Efektifitas Pengendalian Risiko adalah sebagai berikut:

No	Unit Pemilik Risiko	Jumlah Pernyataan Risiko	Jumlah Besaran Risiko yang direspon $\geq$ Besaran Risiko Aktual	Jumlah Besaran Risiko yang direspon $\leq$ Besaran Risiko Aktual	Efektivitas Besaran Risiko (%)	Kesesuaian dan Kelengkapan Profil Risiko Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (%)	Efektifitas Pengendalian Risiko (Efektifitas Rata-Rata)
1	Setditjen	8	6	2	18,75	25,00	21,88 %
2	PSSPP	7	3	4	10,71	21,00	15,86 %
3	PPISDA	4	3	1	18,75	17,00	17,88 %
4	PPP	8	4	4	12,50	23,00	17,75 %
5	PPIP	12	12	0	25,00	13,00	19,00 %
6	PPIJJ	12	12	0	25,00	15,00	20,00 %

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan pembobotan pada 4 aspek penilaian pemberian *reward* atas Penerapan Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2022, ditetapkan bahwa **Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan** merupakan **UPR terbaik dalam Penerapan Manajemen Risiko**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Pemilik Risiko	Keikutsertaan pegawai dan pimpinan di unit kerja dalam rangka menciptakan budaya risiko (%)	Kesesuaian dan kelengkapan Profil Risiko sesuai dengan aturan berlaku (%)	Keikutsertaan dalam kegiatan yang diadakan dalam rangka Manajemen Risiko (%)	Efektivitas Pengendalian Risiko (%)	Bobot (%)	Ranking
1.	Setditjen	25,00	25,00	13,89	21,88	85,76%	1
2.	PPP	25,00	23,00	19,44	17,75	85,19%	2
3.	PSSPP	25,00	21,00	16,67	15,86	78,52%	3
4.	PPISDA	25,00	19,00	13,89	18,88	76,76%	4
5.	PPIJJ	25,00	15,00	13,89	20,00	73,89%	5
6.	PPIP	25,00	13,00	16,67	19,00	73,67%	6

Demikian Risalah Pemberian *Reward* Unit Kerja Terbaik atas Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2022 disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Jakarta, 6 Februari 2023

Direktur Jenderal,



Herry Trisaputra Zuna

NIP. 196705151996031001

